

# **RANCANGAN**

## **RISALAH**

### **RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI III DPR RI DENGAN BNN, BNPT, KPK, DAN LPSK**

#### **----- (BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN)**

Tahun Sidang : 2017-2018  
Masa Persidangan : V  
Rapat ke :  
Sifat : Terbuka  
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat  
Hari/tanggal : Kamis, 7 Juni 2018.  
Waktu : Pukul 11.15 – 13.50 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Komisi III DPR RI.  
Ketua Rapat : Erma Suryani Ranik, S.H. /Wakil Ketua Komisi III DPR RI.  
Sekretaris : Dra. Tri Budi Utami, SH, M.Si/Kabag Sekretariat Komisi III DPR RI.

#### **PIMPINAN RAPAT (ERMA SURYANI RANIK, SH/F-PD):**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarukatuh,*  
Salam sejahtera buat kita semua.

Yang kami hormati Bapak-Ibu Anggota Komisi III DPR RI,  
Yang kami hormati Bapak Kepala BNN beserta jajarannya,  
Yang kami hormati Bapak Kepala BNPT beserta jajarannya,  
Yang kami hormati Ketua KPK beserta jajarannya,  
Dan yang terakhir Kepala LPSK beserta jajarannya.

Bapak-Ibu sekali hari ini ada 5 institusi yang hadir bersama Komisi III, untuk kita dengarkan pembahasan tentang RKA tahun anggaran 2019, kemarin kita sudah menyelesaikan mitra-mitra kerja kami yang lain dan paket yang terakhir ini untuk paket 5 institusi ini menjadi paket yang terakhir, mudah-mudahan bisa diselesaikan semuanya sebelum kita memulai libur panjang lebaran 2018 ini. Sesuai dengan laporan Sekretariat rapat kali ini sudah ditanda tangani dan dihadiri 6 Fraksi dari 10 Fraksi yang ada di DPR, dengan ditanda tangani oleh 12 dari 52 orang Anggota Komisi III, berdasarkan 251 ayat 1 peraturan DPR tentang tata tertib maka perkenankanlah kami untuk membuka rapat ini dan rapat ini dinyatakan terbuka untuk umum.

(Rapat Setuju)

Selanjutnya kami sampaikan terima kasih kepada 5 institusi yang telah hadir pada rapat kali ini dan ketua-ketuanya langsung, kita akan langsung meminta pembahasan RKA Kementerian dan Lembaga pada tahun 2019 dari masing-masing institusi ini, waktu saat ini menunjukkan 11.25 WIB dan saya tawarkan kepada Bapak-Ibu sekalian kita selesai pembahasan ini pukul 13.00 WIB, setuju ya.

(Rapat Setuju)

Dengan demikian Bapak-Ibu kita akan memulai rapat kita kali ini, saya ingin kita memulainya dari institusi yang paling menimbulkan perbincangan akhir-akhir ini, kita mulai dari BNPT Pak, karena barusan kita setuju RUU menjadi Undang-undang pasti banyak perubahan-perubahan sependek pengetahuan saya banyak kewenangan baru, jadi kita minta paparan dari Kepala BNPT untuk menyampaikan kira-kira kisi-kisi anggaran yang akan dibuat pada tahun 2019, Pak waktunya 10 menit ya mohon dipakai dengan efektif karena kami sudah punya bahan yang cukup lengkap nanti tinggal pendalamannya lebih tajam, silahkan Pak.

### **KEPALA BNPT: (KOMJEN PO.DRS.SUHARDI ALIUS)**

Yang kami hormati Pimpinan Komisi III DPR RI,  
Yang kami hormati Anggota Dewan Komisi III DPR RI,  
Yang kami hormati Pimpina Lembaga yang hadir pada rapat hari ini.  
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarukatuh,  
Selamat siang salam sejahtera bagi kita semua.

Sebagai umat beragama tidak berhenti-hentinya kita mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT Tuhan yang Maha Kuasa, atas berkat rahmatnya kita dapat menghadiri rapat kerja dengan Pimpinan dan Anggota Dewan Komisi III DPR RI, perkenankan kami menyampaikan materi rapat dengar pendapat sesuai dengan surat undangan dari Pimpinan DPR RI nomer AG/09680/DPRRI/V/2018 Tanggal 28 Mei 2018, dengan pokok pembahasan rapat pembahasan RKAKL dan RKP tahun 2019. Dengan kesempatan rapat dengar pendapat ini kami dapat sampaikan pokok bahasan sebagai berikut:

1. Pertama pagu indikatif BNPT Tahun 2019.
2. Kebutuhan anggaran yang belum terpenuhi dalam pagu indikatif 2019.
3. Perbandingan pagu anggaran.
4. Rancangan awal rencana kerja Pemerintah Tahun 2019.
5. Prioritas nasional BNPT Tahun 2019.
6. Kinerja BNPT.

Kami laporkan kepada Pimpinan bahwa terkait dengan persepsi Ibu Pimpinan tadi, kami sudah berkoordinasi dengan Kemenpan untuk dalam rangka melatar belakangi dengan Undang-undang ini, kami akan spesifikasi bidang kelembagaan juga di BNPT tapi akan kami komunikasikan dalam tempo setelah lebaran untuk pelebaran institusi ini termasuk anggaran-anggarannya.

Masuk yang pertama pagu indikatif BNPT Tahun 2019, sesuai surat bersama antara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan Republik Indonesia, nomor 209/MPTN/0101/04/2018 dan nomor S269/MK02/2018 Tanggal 16 April 2018, BNPT mendapatkan pagu indikatif tahun 2019 sebesar Rp 699.598.337.000,00, dengan rincian

yaitu angka *best line* tahun 2018 sebesar Rp 423.598.337.000,00 dan tambahan anggaran belanja modal sebesar Rp 276.000.000.000,00. Adapun tambahan anggaran belanja modal sebesar Rp 276.000.000.000,00 untuk pertama peralatan pusat kendali krisis sebesar Rp 110.311.820.000,00 ini juga bertindak dengan dari pada Undang-undang yang baru kita akan bertindak sebagai pusat kendali krisis bagi alat Presiden, kemudian yang kedua gedung dan pusat pengendalian krisis sebesar Rp 165.626.176.000,00.

Pertama pagu indikatif BNPT berdasarkan program kerja dan program kegiatan, pembagian alokasi pagu indikatif BNPT Tahun 2019 berdasarkan kegiatan sebagai berikut, penanggulangan terorisme Rp 699.000.000.000,00, bidang pencegahan Rp 146.000.000.000,00, bidang penidakan Rp 117.000.000.000,00, bidang kerja sama internasional Rp 47.000.000.000,00, dukungan administrasi dan SDM Rp 385.000.000.000,00, dan pengawasan internal lainnya Rp 2.500.000.000,00.

Pagu indikatif BNPT berdasarkan jenis belanja, pembagian alokasi pagu indikatif BNPT Tahun 2019 berdasarkan jenis belanja yang pertama adalah belanja pegawai 23 Miliar sekian, belanja barang 400 Miliar sekian dan belanja modal 276 Miliar sekian, kebutuhan anggaran yang belum terpenuhi dalam pagu indikatif Tahun 2019, dari usulan anggaran BNPT Tahun 2019 dalam aplikasi Krisna Tahun 2019 sebesar Rp 836.880.299.000,00 akan tetapi dipenuhi dalam pagu indikatif sebesar Rp 699.598.337,00 sehingga masih terdapat kekurangan-kekurangan pemenuhan anggaran sebesar Rp 150.283.960.000,00, kekurangan anggaran sebesar Rp 150.283.960.000,00 itu adalah untuk yang pertama adalah adanya penambahan formasi jabatan dalam struktur organisasi BNPT Tahun 2017.

Sesuai dengan surat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B12/MKT/01/2017 dan peraturan kepala BNPT nomor PER01/KBNPT/1/2017 tentang organisasi dan tata kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang sampai hari ini tidak dukung anggarannya, kebutuhan tambahan anggaran sebesar Rp 29.031.734.000,00 untuk pelaksanaan tugas dan fungsi formasi penambahan jabatan baru tersebut, diantaranya Sub Direktorat Pengawasan pada Direktorat Pencegahan, kemudian yang kedua Sub Direktorat Pemulihan Korban Aksi Terorisme pada Direktorat Perlindungan, kemudian yang ketiga Sub Direktorat Pembina dalam Lembaga Masyarakat Khusus Teroris pada Direktorat deradikalisasi, Sub Direktorat Teknologi Informasi pada Direktorat Penidakan, Sub Direktorat Penggunaan Kekuatan pada Direktorat Pembinaan Kemampuan, Sub Direktorat Analisis dan Evaluasi penegakan hukum pada Direktorat Penegakan Hukum, kemudian yang terakhir Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat pada Biro Perencanaan Hukum dan Hubungan Masyarakat.

Pemenuhan kebutuhan anggaran untuk efektivitas pelaksanaan Pusat Deradikalisasi dan Pusat Pengendalian Krisis sebesar Rp 108.252.228.000,00 dengan rincian sebagai berikut, peralatan pusat pengendalian krisis sebesar Rp 52.294.450.000,00, peralatan balai latihan kerja pusat deradikalisasi Rp 21.500.000.000,00, furniture gedung pusat pengendalian krisis sebesar Rp 18.750.000.000,00, kemudian efektivitas pelaksanaan satgas cegah sebesar Rp 15.707.778.000,00. Selain itu pemenuhan kebutuhan anggaran untuk perubahan struktur organisasi, serta perubahan tugas, dan serta fungsi baru, karena ada Revisi Undang-undang no 15 Tahun 2013 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme sebesar 18.000.000.000,00 sehingga total kebutuhan anggaran yang belum terpenuhi dalam Tahun 2019 sebesar Rp 137.283.962.000,00 ditambah Rp 18.000.000.000,00 jadi jumlahnya Rp 155.283.962.000,00.

Adapun rincian anggaran yang belum terpenuhi dalam pagu indikatif tahun 2019 sebagai berikut, Peralatan Pusat Pengendalian Krisis sebagaimana kami sebutkan ada 52 Miliar sekian, Balai Latihan Kerja Pusat Deradikalisasi 21 Miliar sekian, furniture gedung Pusat Pengendalian Krisis 18 Miliar sekian, efektivitas pelaksanaan satgas cegah 15 Miliar, dan penambahan struktur organisasi dan tugas serta fungsi baru sejak 2017 sebesar 29 Miliar sekian, serta perubahan struktur organisasi dan tugas serta fungsi baru sebagai akibat adanya perubahan revisi UU sebesar 18 Miliar, hingga totalnya adalah Rp 150.283.962.000,00. Perbandingan pagu anggaran, rincian perbandingan pagu anggaran BNPT Tahun 2017, 2018, 2019, berdasarkan kegiatan adalah sebagai berikut, untuk tahun 2017 totalnya ada Rp 724.995.368,00, alokasi 2018 lebih kecil Rp 505.586.324,00 dan alokasi tahun 2019 adalah 699.598.337,00 dengan rincian tidak kami sebutkan sudah ada dibawahnya.

Selanjutnya yang ke empat Rancangan Awal RKP 2019, kebijakan penyusun RKP 2019 mengusung teman pemerataan pembangunan untuk pertumbuhan berkualitas, menitik beratkan kepada perkuatan pelaksanaan prinsip *money follow programs* melalui pendekatan tematik, holistik, intergratif dan spasial. Ditahun terakhir pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah RPJMN 2015-2019 ini, pada rencana kerja Pemerintah tahun 2019 terdapat 5 prioritas nasional, yaitu yang pertama pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar, kedua pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman, ketiga peningkatan nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja melalui pertanian, industri, pariwisata, dan jasa produksi lainnya, keempat pemantapan ketahanan enegeri, pangan, dan sumber daya air, dan yang kelima adalah stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan Pemilu. Pada tahun 2019 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme masuk dalam salah satu dari 5 prioritas nasional yaitu prioritas kelima, stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan Pemilu, dengan proyek prioritas nasionalnya adalah keamanan ketertiban nasional (Kamtibnas) dan keamanan cyber, serta kegiatan prioritas nasional BNPT adalah penanggulangan terorisme dan radikalisme.

Kelima Prioritas Nasional BNPT Tahun 2019, dari total pagu indikatif BNPT tahun 2019 sebesar Rp 699.598.337.000, didalamnya terdapat alokasi anggaran untuk pemenuhan prioritas nasional badan proyek prioritas sebesar Rp 271.383.505.000,00 dengan rincian sebagai berikut, Program Penanggulangan Terorisme di Bidang Penanggulangan Terorisme di Bidang Pencegahan sebesar Rp 129.614.101.000,00, Penanggulangan Terorisme di Bidang Penindakan Rp 106.236.804.000,00, Penanggulangan Terorisme di Bidang Kerjasama Internasional sebesar Rp 17.500.000.000,00 dan dukungan Adminstrasi dan SDM sebesar Rp 15.549.500.000,00.

Kinerja BNPT yaitu akuntabilititas kinerja dan keuangan BNPT, capaian akuntabilititas kinerja dan keuangan BNPT sejak tahun 2011 sampai dengan 2017 adalah sebagai berikut, tahun 2011 kita masih menginduk kepada BA Kemenkopolhukam, kemudian tahun 2012 kita mendapatkan WDP, kemudian 2013 sampai dengan kemarin 2017 BNPT 5 kali berturut-turut mendapatkan WTP.

Demikianlah menyampaikan kami pada dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI pada hari ini Kamis 7 Juni 2018, atas perhatian dan kerja sama yang baik selama ini dari Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih, *Billahi Taufiq Walhidayah,*

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarukatuh.*

## **PIMPINAN RAPAT:**

*Walaikum'salam Warahmatullahi Wabarukatuh,*

Terima kasih Pak, selanjutnya ke KPK silahkan Pak Agus 10 menit juga ya Pak.

## **KETUA KPK: (AGUS RAHARDJO)**

Terima kasih Ibu.

Yang saya hormati Ibu Pimpinan Komisi III,  
Yang saya hormati Anggota Komisi III,  
Yang saya hormati rekan-rekan dari BNPT,  
Yang saya hormati rekan-rekan dari BNN,  
Yang saya hormati rekan-rekan dari Komnasham,  
Yang saya hormati rekan-rekan dari LPSK.  
Hadirin yang saya hormati.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarukatuh*

Kami secara cepat Ibu ingin menyampaikan dan mungkin ada yang kita lewati presentasinya, jadi pagu indikatif yang kami terima itu adalah sebesar Rp 813.000.000.000,00 ini sebetulnya lebih kecil dibanding yang kami usulkan diawal, karena kami mengusulkan diawal itu kalau tidak salah melewati angka 1 Triliun yaitu Rp 1.046.300.000.000,00 kemudian ditentukan pagu indikatifnya Rp 813.000.000.000,00. Kemudian yang perlu Bapak-Ibu kemudian ketahui adalah pada waktu kami mulai menjabat pada tahun 2017 itu ada penambahan pegawai yang cukup besar, penambahan pegawai yang kami sebut Indonesia Memanggil 11 dan Indonesia memanggil 12 itu jumlahnya 391 orang, jadi digabungkan dengan jumlah pegawai KPK pada waktu kami masuk sebesar 1.180 sekarang pegawai KPK itu 1.571, jadi penambahan pegawai pada waktu kami masuk itu 33%.

Secara otomatis dengan bertambahnya pegawai itu belanja pegawai kami naik, jadi kalau dengan urut-urutnya nanti begini Ibu, kalau kami bandingkan perbandingan pagu indikatif ini dibandingkan dengan yang kami terima itu memang ada kenaikan pagu, karena yang dahulu kami hanya menerima 790 ditahun 2018 sekarang kami menerima 813 itu memang naik 2,9% tetapi nanti ada sedikit kekurangan-kekurangan, contohnya belanja pegawai yang 603 ini tidak bisa memenuhi kebutuhan kami karena kurangnya nanti masih sekitar 72 Miliar, jadi mohon nanti dipertimbangkan betul keputusan dari Bapak-Ibu yang terhormat di DPR untuk kemudian mengakomodasi betul-betul kepentingan kami.

Kalau kita lihat di slide ini juga agak aneh, dalam arti sudah jumlah pegawai kita naik kemudian program untuk pemberantasan korupsinya juga turun disini, jadi inikan kelihatan program untuk pemberantasan korupsinya kalau tahun lalu 250 sekarang ini 209, jadi prinsipnya jadwal kekurangan yaitu kekurangan di belanja pegawai dan secara logika tidak mungkin kalau pegawainya nambah 33% kemudian performanya malah turun itu malah lucu itu nanti, oleh karena itu kami mohon dengan sangat program pemberantasan korupsi ini juga dinaikan, karena kami terus terang sudah merancang kalau ditahun 2018 yang lalu rata-rata performa kami 100 kasus dengan detail sebenarnya bisa kami sebutkan, penyelidikan 123 kasus, penyidikan 121 kasus, penuntutan 103 kasus, eksekusi setelah putusan pengadilan itu 83 kasus.

Tahun ini 2019 kami mengharapkan rata-rata 100 ini menjadi 200, jadi otomatis memang kami sangat berharap program pemberantasan tindak pidana korupsi itu dinaikan supaya performanya meningkat, oleh karena itu secara mudah kami menyimpulkan diakhirnya sebenarnya tanpa Bapak-Ibu mendalami hal-hal yang mungkin agak rumit, nanti penjelasannya bisa Bapak-Ibu eksplor lebih lanjut. Secara total kami mengusulkan penambahannya itu 171 Miliar yaitu pertama untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai yang tadi untuk bayar pegawai, kemudian yang kedua untuk menambah supaya performanya ini tidak turun dari 100 kasus dinaikan menjadi 200 kasus itu tambahannya 171 Miliar, itu kalau dijumlahkan menjadi 985 Miliar masih lebih kecil dari usulan kami yang pertam, jadi kami mengusulkan kalau diperkenankan anggaran KPK Tahun 2019 itu besarnya 985 Miliar.

Demikian secara singkat, terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarukatuh.*

#### **PIMPINAN RAPAT:**

*Walaikum'salam Warahmatullahi Wabarukatuh,*

Terima kasih Pak Agus, selanjutnya kita akan dengarkan dari BNN silahkan Pak Heru.

#### **KEPALA BNN: (KOMJEN POL DRS.HERU WINARKO)**

*Bismillahirrahmanirrahim.*

Pimpinan Komisi III DPR RI yang kami hormati,  
Anggota Komisi III DPR RI yang kami hormati,  
Dan rekan-rekan dari KPK, BNPT, dan LPSK.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarukatuh,  
Selamat pagi menjelang siang,  
Salam sejahtera untuk kita semua.*

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas perkenannya kita dapat bersama melaksanakan RDP dengan Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR Republik Indonesia, sesuai surat Setjen Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia nomor 09681/DPRRI/V/2018 Tanggal 28 Mei 2018 perihal undangan rapat dengar pendapat, berdasarkan surat bersama Menteri PPN, Kepala Bappenas, dan Menteri Keuangan, tentang pagu indikatif KL dan rancangan awal RKP 2019, BNN mendapat pagu sebesar Rp 1.590.378.128.000,00 dengan rincian sebagai berikut, DNPTL pencegahan pemberantasan sebanyak Rp 908.225.044.000 dan P4GN Rp 601.153.084.000,00.

Setelah dilakukan penajaman dan penyesuaian terhadap kebutuhan anggaran BNN tahun 2019 dengan memperhatikan, (A) lokasi proyek prioritas nasional, kebutuhan dasar yang harus terpenuhi, belanja pegawai oprasional dan belanja barang operasional, (B) best line Tahun 2019, dan (C) hasil kesepakatan pertemuan trilateral meeting antara BNN, Bappenas, dan Kementerian Keuangan pada tanggal 2 Mei 2018, maka disusun rencana kerja BNN Tahun 2019 yang mengambil tema meningkatkan kapasitas organisasi dalam rangka memperluas layanan publik P4GN, ini perlu saya sosialisasikan P4GN rupanya banyak yang belum tahu bahwa program P4GN adalah Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika, dengan mengharapkan

fokus kepada (1) pembangunan infrastruktur layanan publik BNN, (2) upaya peningkatan reformasi birokrasi BNN, (3) peningkatan kapasitas SDM BNN, dan (4) pemenuhan belanja operasional pegawai BNN dan belanja operasional barang BNN di 21 BNN Kabupaten Kota yang baru.

Dengan rumusan anggaran perprogram sebagai berikut, DMPTL Rp 938.388.550.000,00 dan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba Rp 570.989.578.000,00 kemudian dari total anggaran tersebut sebagian di alokasikan untuk mendanai proyek prioritas nasional BNN Tahun anggaran 2019 sebagai berikut, kajian pencegahan dan penyalahgunaan (1) prekursor narkoba dalam sektor farmasi dan non farmasi 1 Miliar, riset kesehatan dampak narkoba 1,5 Miliar, survei nasional penyalahgunaan narkoba 2019 9,2 Miliar, peningkatan kapasitas laboratorium uji narkoba pusat 37 Miliar, peningkatan kapasitas laboratorium uji narkoba daerah 5 Miliar, pengembangan model intervensi ketahanan keluarga anti narkoba 3 Miliar, kajian model-model intervensi sosial pencegahan penyalahgunaan narkoba 1 Miliar, peningkatan kapasitas relawan anti narkoba 3,25 Miliar, pelaksanaan proyek alternatif development 2,954 Miliar, pengembangan model pendidikan anti narkoba untuk kalangan remaja 2 Miliar, peningkatan kompetensi petugas rehabilitasi dibalai besar rehabilitasi BNN 4,776 Miliar, pengembangan sistem komando operasi interdiksi terpadu 20 Miliar, pembangunan pos komando interdiksi terpadu 30 Miliar, penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba 52,223 Miliar, penyelidikan dan pemusnahan lahan ganja dan tanaman terlarang lainnya 5,424 Miliar, penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkoba 20,621 Miliar.

Disamping itu proyek prioritas KL BNN Tahun anggaran 2019 sebagai berikut, penyusunan kajian evaluasi dan restrukturisasi organisasi 1 Miliar, pembangunan sistem penilaian kinerja individual pegawai 1 Miliar, pembinaan unit vertikal dan tim terpadu lintas fungsi 2 Miliar, pelaksanaan pengendalian penyusunan peraturan Perundang-Undangan 800 Juta, operasional program kelompok kerja pengelolaan Q9 3,182 Miliar, meningkatkan kapasitas penggiat dan kader pemuda anti narkoba di wilayah proyek percontohan alternatif development 1,250 Juta. Penyelesaian alokasi belanja operasional 2019 sebagai berikut, alokasi belanja operasional 2019 belanja pegawai 470,50 Miliar kemudian belanja barang 317,505 Miliar, alokasi belanja operasional untuk 5.361 personil dan belum memperhitungkan rencana penambahan 1.280 personil, dengan rincian 129 personil kemudian 113 personil alih status, 155 personil CPNS, 252 personil untuk 21 BNN K baru, 630 personil penambahan kuota pegawai satker vertikal melalui DPK, jadi kebutuhan anggaran yang seharusnya diajukan sejumlah Rp 509.538.218.000,00 untuk kebutuhan 6.641 personil.

Realokasi belanja barang operasional telah memperhitungkan operasional dan pembiayaan kantor gedung baru, pusat laboratorium narkoba, sewa data center, honor pengelola keuangan satuan kerja vertikal, termasuk 21 BNN K baru dan dukungan operasional serta pemeliharaan kantor untuk 21 BNN K baru.

Pimpinan Anggota Komisi III DPR RI dan hadirin sekalian.

Perkembangan perkuatif baru atau NPS *New Psychoactive Substances* menciptakan celah bagi kejahatan, dikarenakan banyak narkoba jenis baru yang belum diatur oleh hukum, terdapat 739 narkoba jenis baru di dunia dan sebanyak 71 diantaranya beredar di Indonesia, sejauh ini baru 65 yang terdaftar didalam lampiran Peraturan Menteri Kesehatan nomor 57 dan 58 Tahun 2017, ini berarti terdapat 674 yang beredar didunia dan sewaktu-waktu dapat masuk ke Indonesia namun belum diatur penanganannya. Kondisi tersebut merupakan salah satu tantangan yang dihadapi BNN

selain beban tugas lain yang diemban dalam penanggulangan masalah narkoba yang semakin besar dari waktu ke waktu, yang menuntut perkembangan organisasi dan kapasitas kelembagaan yang optimal namun belum diimbangi dengan dukungan anggaran yang memadai, hal ini dapat tergambar dari besar pagu indikatif Tahun 2019 sebesar Rp 1.509.378.025.000,00 atau lebih rendah sebanyak Rp 222.755.122.000,00.

Jika dibandingkan dengan alokasi anggaran Tahun 2018 dengan besaran Rp 1.732.133.250.000,00 hal ini bertolak belakang dengan perkembangan organisasi BNN, sebagaimana yang sudah disetujui oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada akhir tahun 2017, jumlah Satker BNN bertambah menjadi 223 Satker karena adanya penambahan 21 BNNK yang baru yang sampai saat ini belum mendapatkan alokasi anggaran dari APBN. Dengan seijin Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI yang terhormat BNN mengajukan tambahan alokasi anggaran Tahun 2019 sebesar Rp 1.456.980.745.000,00 untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang belum mendapatkan alokasi pada pagu indikatif Tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut, pengadaan instrumen video comprens 48 Miliar.

#### **PIMPINAN RAPAT:**

Pak Heru rinciannya tidak usah dibaca Pak langsung saja.

#### **KETUA LPSK: (DR.ABDUL HARIS SEMENDAWAI)**

Baik Ibu.

Pengembangan sistem pelayanan kontek center, pengembangan sarana dan prasarana, pengadaan mobil sosialisasi diseminasi informasi, pengadaan kendaraan fungsional, pengadaan masyarakat, pengadaan mobil tahanan, dan insemerator sebanyak 4 unit, pengadaan mobil operasional penindakan dan pengejaran, pengadaan taktikal equipment, pengadaan direction finder, pengadaan intelligent tulkip, pengadaan amunisi senjata kaliber 9X21 mm, pembangunan gedung BNN Pusat, pembangunan gedung BNN Provinsi, pembangunan gedung BNN Kabupaten Kota, belanja pegawai tambahan sebanyak 1.280 personil, pengadaan sarana dan prasarana kantor BNN Provinsi Jawa Timur, pemeliharaan dan perawatan kendaraan fungsional, pemberdayaan masyarakat, dukungan layanan kediklatan, peningkatan kapasitas ASN BNN, dukungan layanan paska rehabilitasi, dukungan kegiatan P4GN lainnya termasuk 21 BNNK baru.

Pimpinan Anggota Komisi III DPR RI dan hadirin sekalian, demikian paparan kami semoga memperoleh tanggapan, masukan, dan dukungan dari Komisi III DPR RI kepada BNN agar mampu melakukan meningkatkan kualitas perencanaan dan management kinerja guna optimalisasi hasil kinerja BNN, dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Atas perhatian Bapak-Ibu Anggota Dewan yang terhormat, saya mengucapkan terima kasih banyak.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarukatuh.*

#### **F-PPP (H.ARSUL SANI, SH.,M.Si):**

*Walaikum'salam Warahmatullahi Wabarukatuh.*



Terima kasih Pak Heru, selanjutnya yang terakhir ini LPSK silahkan Pak 10 Menit juga.

## **KETUA LPSK:**

*Bismillahirrahmanirrahim,  
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarukatuh,  
Selamat siang salam sejahtera bagi kita semua.*

Yang kami hormati Pimpinan Komisi III DPR RI ,  
Yang kami hormati seluruh Anggota Komisi III DPR RI,  
Yang kami hormati Pimpinan Lembaga yang hari ini RDP,  
Hadirin sekalian yang berbahagia.

Pertama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, hari ini kita dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti RDP hari ini dengan sebaik-baiknya, kami juga mengucapkan terima kasih tentunya atas undangan yang telah disampaikan kepada kami dan kami hadir dalam rangka menghadiri rapat dengar pendapat dengan agenda penjelasan RKAKL dan rencana kerja Pemerintah Tahun 2019. Sebelum kami lanjut kami juga ingin mengucapkan selamat terlebih dahulu kepada Ibu Erma Suryani telah diangkat sebagai Wakil Ketua Komisi III dan juga kepada Pak Nurdin telah diangkat sebagai Anggota DPR RI dan kembali bekerja di Komisi III DPR RI.

Bapak-Ibu sekalian yang berbahagia kami ingin sampaikan bahwa anggaran LPSK disesuaikan dengan mandat LPSK sebagaimana diberikan oleh Undang-undang 13 2016 dan Undang-undang 31 2014, yaitu dalam rangka untuk memberikan jaminan keamanan dan hukum serta pemenuhan hak bagi saksi, korban, pelapor, justice collaborator, dan ahli, dalam proses peradilan pidana untuk sejumlah tindak pidana yaitu tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana narkoba sikotropika, tindak pidana pelanggaran HAM berat, tindak pidana trafficking, money laundering, kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta kejahatan lain yang membahayakan jiwa dari saksi dan korban.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut dirumuskan berbagai program meliputi beberapa aspek yaitu:

1. Pemberian layanan perlindungan bantuan serta pemenuhan hak lainnya kepada saksi korban, dengan lebih proaktif dalam penanganan perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan korban.
2. Perluasan jangkauan layanan perlindungan saksi dan korban melalui pembentukan LPSK perwakilan di daerah.
3. Penguatan landasan hukum melalui pembentukan berbagai peraturan yang bersifat internal maupun eksternal terkait perlindungan saksi dan korban.
4. Bersama dengan Kementerian dan lembaga terkait ikut membangun landasan pengaturan untuk pelaksanaan perlindungan saksi atau korban.
5. Peningkatan kerjasama antar lembaga baik tingkat nasional, regional, maupun internasional, untuk memperkuat dan memperluas layanan, perlindungan, dan pemenuhan hak saksi korban tindak pidana.
6. Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan perlindungan saksi dan korban.
7. Membangun kesadaran dan partisipasi publik tentang perlindungan saksi dan korban.

8. Melakukan pendampingan pembentukan pelaksanaan Glowing Sistem di Kementerian dan Lembaga.

Pimpinan dan para Anggota Komisi III DPR RI yang kami hormati serta hadirin yang berbahagia.

Sesuai dengan surat dari Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara nomor B1190 Kemensekneg Tanggal 23 April 2018, perihal pagu indikatif Satker pada bagian anggaran 007 Kementerian Sekretariat Negara Tahun Anggaran 2019, LPSK mendapatkan pagu indikatif 2019 sebesar Rp 71.030.000.000,00 nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp 8.900.000.000,00 atau berkurang 11,21% dari alokasi anggaran 2018, penurunan anggaran tersebut tentunya berdampak besar bagi LPSK dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab dari LPSK, oleh karena itu saat ini LPSK sedang mengusulkan juga penambahan anggaran dengan mekanisme inisiatif baru melalui Kemensekneg, untuk dimintakan persetujuan penambahan anggaran kepada Bappenas dan Kementerian Keuangan sebesar Rp 52.448.000.000,00.

Usulan tersebut diantaranya akan digunakan untuk yang pertama pembayaran kompensasi kepada korban tindak pidana terorisme dan juga tentunya layak penanganan layanan medis psikologi kepada korban terorisme, kemudian peningkatan pelaksanaan layanan medis psikologi dan sikososial kepada saksi dan korban dari tindak pidana lainnya, kemudian yang ketiga pembentukan LPSK perwakilan di daerah, apabila usulan anggaran tersebut disetujui maka anggaran LPSK Tahun 2019 menjadi sebesar Rp 123.479.000.000,00.

Pimpinan dan para Anggota Komisi III DPR RI yang kami hormati serta hadirin yang berbahagia.

Dalam rencana kerja prioritas LPSK Tahun 2019 meliputi beberapa kegiatan yang diarahkan kepada 5 hal yaitu:

1. Penguatan manajemen internal melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
  - a. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM di LPSK.
  - b. Pengadaan, pengembangan, teknologi informasi gedung kantor LPSK.
  - c. Penelitian dan pengkajian untuk pengembangan kelembagaan LPSK.
2. Penguatan kelembagaan dalam rangka peningkatan layanan melalui pembentukan LPSK perwakilan daerah, melalui penyiapan gedung dan sarana prasarana lainnya.
3. Penguatan jejaring kerja dengan Kementerian Lembaga dalam rangka pemenuhan layanan sikososial terhadap saksi atau korban, peningkatan kerja sama antar Lembaga baik ditingkat nasional maupun internasional.
4. Pelaksanaan tugas dan fungsi pemberian perlindungan saksi dan korban, serta penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
  - a. Bersikap proaktif dalam memberikan perlindungan kepada saksi korban.
  - b. Peningkatan kualitas pelaksanaan perlindungan saksi dan korban.
  - c. Peningkatan pengelolaan rumah aman LPSK.
  - d. Peningkatan layanan fasilitas permohonan kompensasi dan restitusi.

5. Salah satu jenis tindak pidana yang menjadi prioritas bagi LPSK adalah tindak pidana terorisme, sebagai perwujudan program prioritas nasional di 2019 dibidang penanggulangan terorisme dan konflik sosial politik sebagaimana disebutkan diatas, bahkan dengan ditetapkannya perubahan atas Undang-undang Terorisme tersebut, pelayanan terhadap hak korban terorisme akan menjadi tanggung jawab LPSK dan LPSK telah menuangkan prinsip-prinsip program prioritas nasional, baik kedalam rencana anggaran maupun rencana kerja prioritas LPSK, dengan demikian LPSK berkomitmen penuh untuk mendukung terselenggaranya program prioritas nasional tahun 2018 melalui program kerja LPSK dalam pemberian perlindungan saksi korban tindak pidana terorisme.

Pimpinan dan para Anggota Komisi III DPR RI yang kami hormati serta hadirin yang berbahagia.

Terakhir, pada rapat kerja ini perkenankan kami laporkan pula realisasi anggaran LPSK Tahun 2018, dari alokasi anggaran Satker LPSK Tahun 2018 realisasi anggaran sampai tanggal 04 Juni 2018 adalah sebesar Rp 29.156.967.230,00 atau sama dengan 36,45% dari alokasi anggaran 2018 sebesar 80 Miliar, demikianlah penjelasan kami tentang RKAKL Tahun 2019 diharapkan yang terhormat Pimpinan dan para Bapak-Ibu Anggota Komisi III DPR RI dapat memberi saran dan masukan, agar LPSK dapat bekerja lebih baik lagi. *Wabillahi Taufik Walhidayah,*

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarukatuh.*

#### **PIMPINAN RAPAT:**

Baik Bapak-Ibu sekalian Anggota Komisi III yang saya hormati, kita sudah mendengar paparan dari lembaga-lembaga mitra kita, kita akan melakukan pendalaman dan saya tawarkan dahulu apakah kita pendalam perFraksi atau langsung perorang, kita mulai perFraksi dahulu ya nanti kalau kurang baru perorang, baik kalau gitu kita mulai dari Fraksi pemenang Pemilu dulu ini pemilik negara ini Fraksi PDI Perjuangan silahkan Pak Nurdin.

#### **F-PDIP (Drs.M.NURDIN,MM):**

Terima kasih Pimpinan.

Pimpinan dan rekan-rekan Komisi III yang saya hormati,  
Bapak-Ibu mitra kerja Komisi III yang saya hormati.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarukatuh,*

Pertama-tama kami dari Fraksi PDIP perjuangan bisa memahami apa yang diusulkan oleh mitra-mitra kerja, sehubungan dengan peningkatan penugasannya dan juga dengan adanya penambahan pegawai yang cukup besar, kami dirapat ini semua melihat gelondongannya saja supaya nanti kita usulkan ke Banggar Besar, tapi mohon untuk dipersiapkan juga plan B dari masing-masing satuan, apabila setelah nota keuangan ini diundangkan, pasti ada sasaran prioritas yang perlu karena ada beberapa hal yang mungkin tidak bisa terdanai, saya kira itu dari kami terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarukatuh.*

**PIMPINAN RAPAT:**

Baik terima kasih, silahkan Pak Masinton ingin menambahkan.

**F-PDIP (MASINTON PASARIBU,SH):**

Terima kasih Pimpinan.

Rekan-rekan Anggota Komisi III dan juga para mitra kerja, saya hanya beberapa berkaitan dengan anggaran KPK ini, kalau pernyataan-pernyataan di media itu kenapa KPK tidak kedaerah-daerah tidak bisa bongkar skandal yang besar, selalu anggaran kami terbatas kemudian personil terbatas, sementara tahun ketahun ini pengajuannya ini segini-segini saja Pak, jadi kalau dibilang kendala anggaran terbatas yang membatasi anggaran itu kan KPKnya, karena ini yang selalu pernyataan kita dengar itu anggaran kami terbatas, personil kami terbatas katanyakan tetapi yang diajukan itu anggarannya ya segini-gini aja dari tahun ke tahun Pak tidak ada penambahan, jadi kalau itu dijadikan alasan menurut saja juga tidak tepat.

Kemudian ada yang coba saya inikan ini kegiatan pengembangan dan pemanfaatan jaringan kerja sama antara lembaga instansi bisa sampai 10 Miliar, saya tidak tahu ini pengembangan dan pemanfaatan jaringan kerja sama antara lembaga, instansi, ini apa saja ini Pak kami juga kurang tahu. Karena kalau kami lihat di BNPT ini oprasionalisasi pusat radikalisisasi itu berkisar 9 Miliaran, tentu kita tidak bisa memperbandingkan.

Kemudian juga berkait dengan ada disini ini dipoint uraian program kegiatan penyidikan tindak pidana korupsi, ada output perkara yang dilakukan penyidikan itu 105 perkara itu berkisar hampir 14 Miliar, ini termasuk perkara yang disidik kasus Pelindo bukan Pak kalau termasuk ini berarti dibiayai negara setiap tahun tidak selesai-selesai perkaranya, itu saja Pimpinan yang perlu saya tanyakan karena kita anggarkan perkara tidak selesai-selesai masih tertunda begitu, demikian terima kasih.

**PIMPINAN RAPAT:**

Terima kasih Pak Masinton.

Ini memang KPK tadi melaporkan ada penambahan pegawai totalnya mereka sekarang ada 1.571 ya Pak karena ada masuk 391 orang, jadi bebannya memang agak bertambah dengan penambahan pegawai karena gaji pegawai KPK ini memang luar besar dibanding dengan yang lain, jadi 1 pegawai KPK itu gajinya mungkin bisa gaji 10 pegawai-pegawai ditempat lain, kira-kira begitulah analoginya kenapa juga harus naik. Selanjutnya ke Partai Golkar belum ada ya kemudian kita lanjut kePartai ke-3 Partai Gerindra silahkan Pak Wenny.

**F-GERINDRA (Drs. WENNY WAROUW):**

Bapak-Ibu yang saya hormati serta Pimpinan yang saya hormati.

Saya mengajak keseluruhan saja mulai dari LPSK, BNPT, BNN, dan KPK, karena ini baru pagu indikatif nanti akan berubah, saya ingin mengajak begini agar tugas pokok ini dalam penyusunan anggaran Pak ya, agar tugas pokok harus dihadapkan dengan kalau istilah kita ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan dikantornya Pak.

Saya bahas mulai dari LPSK, kalau anggaran hanya segini mungkin lingkup Jakarta pun mungkin tidak kuat Pak, jadi Bapak tidak ada wawasan untuk melindungi orang yang di Aceh maupun yang di Irian bagaimana rakyat butuh Bapak-Ibu sangat membutuhkan, tapi kalau anggaran hanya segini ya buat apa dan kami sebagai Komisi partner begini senang kalau tugas pokok Bapak-Ibu hebat karena dibantu Komisi III dalam penganggaran begitu. BNPT untuk Undang-undang yang baru bukan meringankan Bapak tapi itu sangat memberatkan apalagi Bapak menjadi leading sector untuk mengatur 36 lembaga, tetapi kalau anggaran hanya begini saya tidak melihat dimana kamu letakan serta kami butuh IT yang besar dalam rangka ini, tidak usah pusing nantikan di Banggar besar kita akan ketemu, bagaimana kita akan kuat-kuatan kemudian bagaimana Komisi III akan membantu partnernya.

Selanjutnya BNN, hebat katanya menangkap berton-ton ya tapi dua-duanya akan saya tanya kalau anggaran hanya seperti ini harusnya Bapak katakan saya butuh kapal cepat, kita nanti ketemu akan ketemu dengan Pemerintah itu gambarkan mana yang lebih bagus mau proyek jalur maritim atau aghtnya disini, itu gambarannya. Apalagi untuk KPK saya selama 4 tahun disini ya anggaran Bapak ya segitu-gitu saja, kemarin saya pancing PPATK saya minta PPATK itu harus join dengan KPK karena anggaran 900 Miliar apa bisanya Pak, ternyata korupsi bukan malah turun tapi begitu saja naik terus. Coba kita kaji ini supaya kita punya tujuan karena korupsi ini memang rata Pak, dalam rangka untuk meminimalis ini coba kembangkan lagi tentang penggunaan IT nya Pak koordinasi dengan terutama PPATK dan Bappenas, kita ambil saja data yang dari BPK apalagi tambah BPKP saya akan tanya nanti untuk pengawasan, berapa *crane* total yang Bapak sidik kemudian berapa *clearance* nya itu disitu baru saya bertepuk tangan bahwa Bapak hebat.

Tapi kalau anggaran segini tidak kuat Pak, apalagi indeks perkaranya kecil sekali coba lebih kembangkan lagi IT nya supaya betul-betul departemen-departemen oknum yang masih melaksanakan korupsi ini tiarap, itu yang kita butuhkan sebagai partner kerja. Kira-kira bisa dipahami ya, terima kasih Pimpinan.

#### **PIMPINAN RAPAT:**

Terima kasih Pak Wenny Warouw dari Fraksi Partai Gerindra, selanjutnya ke Fraksi PAN belum ada ya kita lanjutkan ke PKB silahkan.

#### **F-PKB (DR. H.M. ANWAR RAHMAN, M.H):**

Terima kasih Pimpinan.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarukatuh,*

Yang kami hormati rekan-rekan Anggota Komisi III,  
Saudara Ketua KPK,  
Saudara Kepala BNN,  
Saudara Kepala BNPT,

Saudara Ketua LPSK,  
Hadirin yang kami hormati.

Kalau kita cermati semua pengajuan anggaran yang dilakukan oleh Lembaga-lembaga ini semuanya menginginkan penambahan anggaran tetapi tidak jelas, anggaran 2017 itu penggunaannya bagaimana kemudian penyerapannya berapa persen ini yang hampir semuanya tidak menjelaskan, baik kalau sudah ada audit dari BPK tetapi penyerapannya berapa persen, orang anggaran yang lalu tidak bisa digunakan dengan baik tidak habis sekarang mau minta lagi, ini logika sederhananya seperti itu. Makanya harus dirinci tahun lalu sektor ini pengajuan sekian kemudian realisasi sekian jadi jelas per item penyerapannya jelas tapi ini tidak ada ini, di BNPT juga begitu kemudian juga di KPK sama pengajuan anggaran tambahan anggaran 171 Miliar tapi bagaimana penyerapan tahun lalu tidak ada pertanggung jawabannya, pertanggung jawaban tahun lalu secara administratif BPK iya, tetapi penggunaan anggaran rinciannya ini untuk apa dan realisasinya sampai berapa ini tidak ada juga.

Selanjutnya juga KPK ini ditambah rancangan anggaran untuk pencegahan kerjasama dengan inspektorat atau aparat penegak hukum yang ada di daerah, salah satu faktor maraknya korupsi adalah kenapa tidak berfungsinya inspektorat yang berada di daerah-daerah, kalau di perusahaan negara namanya SPI Satuan Pengawas Internal, ini yang belum disentuh KPK sehingga yang marak sekarang hanya OTT, korupsi-korupsi besar yang terstruktur itu belum tersentuh jadi ini kerja sama lah dengan inspektorat di daerah-daerah itu di Pemkab-Pemkab, karena kalau mereka berfungsi tidak akan ada penyelewengan anggaran.

Tetapi mereka tidak berfungsi karena inspektorat di daerah kebanyakan menangani masalah perselingkuhan itu masalahnya, kalau difungsikan ini terus mohon maaf saya lama kerja di Bank, di Bank itu setiap penyelewengan tiap hari bisa dideteksi Pak ada namanya internal audit, hari ini misalnya bagian kredit ini penyelewengan kamu disini langsung disurati di memo dan besok harus sudah ada laporannya. Ini kalau KPK ini koordinasi dengan inspektorat yang ada di daerah tambah anggarannya tidak ada masalah, jadi kita bisa menangkap koruptor-koruptor yang besar bukan koruptor yang kecil-kecil yang 30 juta 20 juta.

Kemudian LPSK, LPSK itu penyampaian yang 2018 sudah disampaikan penyerapan anggaran 36% tapi 2017 tidak ada, tidak disampaikan disini jadi tidak tampak bagaimana penggunaan anggaran rincian penggunaan anggaran, banyak lembaga atau misalnya itu yang pengajuan ini Badan Anggaran itu sampai bulan Juni baru 36% ini jangan-jangan nanti akhir tahun untuk menghabiskan anggaran dicari kegiatan-kegiatan untuk bagaimana cara menghabiskan anggaran, saya rasa begitu Pimpinan terima kasih, mungkin ada teman kami Pak Toha yang ingin menambahkan.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarukatuh.*

#### **PIMPINAN RAPAT:**

*Wallaikum'salam Warahmatullahi Wabarukatuh.*

Silahkan Pak Toha.

**F-PKB (Drs. H. MOHAMMAD TOHA, Sosa.,M.Si):**

Terima kasih Ketua.

Bapak-Ibu sekalian tidak saya sebutkan satu-persatu yang saya hormati.

Yang pertama saya cerita saya sedih ketika membahas anggaran tahun yang lalu Pak, saya bersikeras untuk mengusulkan kenaikan yang signifikan anggaran di BNN dan BNPT, tetapi nyatanya tidak berhasil ini menjadi seharusnya kita harus berkaca bahwa rapat seperti ini tidak basa-basi, artinya siapa yang menentukan ini yaitu dari Pemerintah, Bappenas, Menteri Keuangan, kemudian para Anggota Banggar di DPR, ini tidak harus basa-basi karena pengertian kita apa Pak karena ini rapat yang paling penting menurut saya ada KPK untuk musuh negara kita itu korupsi, kemudian narkoba, sama teroris, inikan ketiganya penting semua termasuk tambah komnas Ham yang sama sekali anggarannya juga tidak pelanggaran-pelanggaran Ham ini sama sekali tidak signifikan, kemudian kemarin PPATK ya kerja sama dalam berbagai hal termasuk di BNN, terorisme, maupun KPK.

Inikan anggarannya tidak signifikan semua Pak, kalau saya melihat di Provinsi Ketua BNNP atau BNN Kota itu menjadi seperti orang buangan, artinya anggarannya tidak mencukupi sama sekali padahal menangani hal yang paling penting dinegara ini, ini saya mohon Pimpinan BNN dan Pimpinan BNPT ini mungkin dengan KPK, juga LPSK, kemudian PPATK, Komnas Ham, barenganlah ke Pak Presiden jadi kita ini serius tidak menangani ini mohon maaf meskipun bukan satu-satunya karena anggaran, tetapi dibuktikan oleh KPK mohon maaf ini dengan gaji yang besar mungkin gaji yang melebihi dari pegawai yang lain itu bisa meningkatkan kinerja juga, artinya itu juga menjadi indikator juga. Kalau bisa BNN, BNPT, ini gajinya staf disamakan dengan KPK karena tugasnya sama beratnya Pak. Kalau anggaran ini tidak mencukupi dari Pemerintah misalkan platform anggaran tadi yang pagu indikatif tadi katakanlah BNN mintanya 200 tapi hanya 175 kurang ya itu targetnya dikurangi Pak, tidak bisa kita paksakan kalau itu memang keadaan negara semacam itu jadi tidak bisa kita paksakan kesana termasuk KPK, ya targetnya ya segitu itu Pak.

Jadi mohon kiranya ini yang mengani musuh negara ini untuk korupsi, narkoba, terorisme, ini tolong bersinergi saya minta tolong menghadap Pak Presiden, karena ini serius atau tidak ini menangani ini. Ada mungkin perubahan besar-besar yang saya usulkan tadi misalkan satu saja dicoba gajinya yang di BNPT dan di BNN samakan dengan di KPK insentifnya tergantung kinerjanya, atau mungkin bisa study banding ke KPK mungkin bisa mengefektifkan SDM yang digaji besar itu. Saya pikir itu Pak bukan main-main kita harus benar-benar menangani hal ini, terima kasih tadi saya tidak menyebutkan angka dan lain-lain tetapi tolong kebijakan ini bisa tindak lanjuti, terima kasih.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarukatuh.*

**PIMPINAN RAPAT:**

*Wallaikum'salam Warahmatullahi Wabarukatuh.*

Terima kasih Pak Toha, selanjutnya karena PKS belum hadir kita ke PPP ya silahkan Pak Arsul.\

**F-PPP (H. ARSUL SANI, SH.,M.Si):**

Terima kasih Ibu Ketua.

Pimpinan dan para Anggota Komisi III yang saya hormati,  
Para Pimpinan mitra yang saya hormati,  
Dari KPK, BNN, BNPT, dan LPSK, beserta seluruh jajaran,  
Serta rekan-rekan media yang kami banggakan.

Pertama-tama tentu kami ingin mengucapkan terima kasih atas paparan RKAKL yang tadi sama-sama kita dengarkan, sebelum menanggapi saya ingin menyampaikan kepada Bapak-Ibu semua para mitra bahwa DPR saat ini telah mengaktifkan kembali sesuai dengan perubahan Undang-undang MD3, yaitu adanya lembaga baru AKD baru yang namanya BAKN Badan Akuntabilitas Keuangan Negara, saya kebetulan yang ditugaskan oleh Fraksi PPP untuk duduk disana karena masing-masing Fraksi memiliki wakil 1 jadi ada 10 orang, ini yang nanti termasuk akan menelisik kinerja Bapak-Ibu semuanya meskipun kami di BAKN basisnya lebih dahulu melihat dari hasil pemeriksaan tahunan BPK, kemudian juga IHPS Ihtisar Hasil Pemeriksaan Semesteran BPK.

Ini yang akan kami gunakan sehingga kalau ada hal-hal yang kami rasakan itu merupakan keganjilan maka BAKN akan minta masing-masing komisi terkait, dalam hal ini Komisi III untuk melakukan rapat kerja pengawasan yang terkait dengan penggunaan anggaran, kalau itu merupakan pelanggaran hukum maka BAKN akan menyampaikannya kepada aparaturnya penegak hukum, jadi kira-kira kedepan akan ada pengawasan yang lebih lagi dari DPR yang terkait dengan penggunaan anggaran.

Selanjutnya yang kedua Bapak-Ibu dalam rangka tentu meningkatkan akuntabilitas dan tata kelola keuangan negara kita, terus terang saya berharap bahwa penyajian RKAKL ini makin lama harus semakin Ibu Ketua Rapat, dari yang sudah menyampaikan di forum Raker Komisi III ini saya terus terang melihat yang paling bagus itu PPATK, PPATK itu dalam melakukan justifikasi anggarannya memulai dengan arah kebijakan kelembagaan, kemudian arah kebijakan itu dituangkan dalam bentuk strategi, dari strategi dituangkan dalam bentuk program kegiatan dengan sasaran strategisnya, kemudian dilengkapi dengan indikator kinerja utama, dan terakhir dicantumkan targetnya.

Ini saya kira yang seluruh mitra Komisi III mestinya mengikuti model yang seperti ini, sehingga pengawasan kami ini jelas berbasisnya itu apa, berbasisnya harusnya adalah paparan Bapak-Bapak semua mulai dari arah kebijakan sampai target seperti yang disampaikan oleh PPATK, ini sangat bagus sekali bahkan penyajiannya mewah tapi kita mengartikan kemewahan yang seperti inilah tetapi ini sangat bagus sekali. Ini yang tampaknya tidak semuanya ada, kami berharap model PPATK ini kedepan bisa digunakan mulai dari arah kebijakan, tentu arah kebijakan memang bisa sama atau hanya bisa mengulang dari tahun-tahun sebelumnya, itu secara umum yang ingin saya sampaikan.

Ada beberapa hal yang ingin saya soroti saya tidak tahu diprogram dan kegiatan di BNN apakah ini juga sudah dianggarkan juga untuk pembahasan revisi Undang-undang narkoba UU 35, karena harusnya menurut waktu saya masih di Baleg itu harusnya pertengahan tahun ini Pemerintah harus menyerahkan kembali kepada DPR, kalau tidak maka menjadi RUU inisiatif DPR berbasis draf yang disusun oleh BNN dan naskah akademiknya. Karena ini saya kira perlu dianggarkan tapi karena memang kita tidak boleh membahas sampai satuan tiga, tapi kalau sampai programkan bolehkan untuk satuan tiga itu cantumkan detailnya sampai detail kegiatan, kita hanya program kegiatan saja ini saya ingin tanyakan.

Untuk KPK ini Pak Ketua, beberapa waktu yang lalu ketika ada musibah Saudara Novel Baswedan, Pak Ketua juga di forum Komisi III ini menyampaikan permohonan untuk mendapatkan dukungan anggaran juga atau persetujuan penggunaan anggaran



karena musibah itukan memang tidak bisa dianggarkan, pada waktu itu kami setuju artinya mendukung upaya untuk pengobatan dan perawatan Novel, namun kami diforum terbuka ini ingin disampaikan juga Pak Ketua berapa jumlah yang telah dikeluarkan KPK untuk mengobati dan merawat Novel, mohon disampaikan di forum terbuka ini berapa jumlahnya dan kira-kira apakah itu sudah tuntas atau masih terus, saya kira dalam semangat transparansi.

Karena saya pernah sampaikan Pak Kepala BNPT karena di mata aparaturnya penegak hukum yang lain, negara ini memberikan ini persepsi ya spesial treatment kepada Pak Novel Baswedan, maka ketika ada Polisi di bacok oleh sindikat narkoba di Medan dan tidak mendapatkan perlakuan yang sama itu keluarga Polisi mengirim SMS ke saya, "apakah kami kurang penting dibandingkan seorang Novel Baswedan", itu kebetulan karena itu sekampung dengan saya seorang Anggota Densus 88 yang terluka juga yang kemudian perhatiannya juga berbeda, karena mungkin dirawatnya di RS Polri itu dikelas III atau di kelas IV saya tidak tahulah. Itu juga komplain juga ketika saya reses di Dapil saya, saya kira kita buka juga maksudnya supaya juga aparaturnya penegak hukum lain apalagi sekarang ada konsen bagaimana negara bisa melindungi aparaturnya penegak hukumnya dengan lebih baik, ini saya kira kita ingin tahu juga itu agar disampaikan secara terbuka.

Berikutnya tentu tidak dalam konteks intervensi proses penegakan hukum Pak Ketua dan Pak Wakil Ketua KPK, kami juga ingin juga sebetulnya mungkin tidak diforum ini tapi nanti dipengawasan ada juga penyajian analisa, jangan sampai berkembang terus-terusan dimasyarakat ini bahwa capaian KPK itu adalah soal OTT-OTT yang jumlah dianggap tidak signifikan dari sisi kerugian negaran, meskipun saya tidak sepakat dengan itu dikarenakan juga harus dihitung juga efek jeranya meskipun kita berdebat juga kalau bicara soal efek jera, mesti ada paparan saya tidak tahu basisnya bukan soal korupsi besar atau kecil tetapi bisa juga sektor-sektor atau yang lain-lainnya terserah, sehingga tidak menjadi pertanyaan terus-terusan dimasyarakat, beberapa kasus besar yang menarik perhatian publik ini progresnya lebih lambat kasus-kasus OTT.

Tadi sudah disebut oleh Pak Masinton misalnya terkait dengan penanganan kasus RJ. Lino, ini tidak tahu sudah berulang tahun keberapa tetapi orangnya diperiksa saja konon belum, ini sehingga tercermin anggarannya bahwa anggaran untuk KPK kalau kita hitung mulai dari penyelidikan, penyidikan, pra penuntutan, penuntutan, kemudian sampai eksekusi yang memang harus diakui kalau kita bandingkan dengan anggaran perkara korupsi yang ditangani oleh Kepolisian dan Kejaksaan inikan anggaran KPK kalau kita hitung 3x lipat rata-rata, kalau kita bandingkan misalnya anggarannya gedung bundar dan jajarannya kebawah itu kalau dihitung rata-rata itu itungan saya itu KPK mendapatkan 3x lipat, tentunya karena jumlahnya lebih besar maka tentunya kasusnya diharapkan yang lebih besar.

Ada juga cacatan kritisnya ini karena masih terkait dengan anggaran, misalnya Pimpinan KPK selalu menyatakan jangan dilihat kasus kecilnya ini karena ini pintu masuk untuk kasus yang lebih besar, tapi setelah sampai putusan inkrah ternyata tidak kelihatan kasus yang lebih besar, inilah yang selalu menjadi pertanyaan-pertanyaan kita. Ini yang mohon perhatian juga agar dukungan agar yang kami berikan, kami bahkan setuju paling tidak Fraksi PPP kalau anggaran KPK ini juga diperbesar, tetapi juga disisi lain juga lebih jelas.

Untuk yang terakhir Pak Deputi Pencegahan, kami mohon juga agar diberi pencerahan ini termasuk juga untuk BNPT, ketika kita bicara mengenai program pencegahan ini paling tidak secara kualitatif itu indikator keberhasilannya itu bisa kami ketahui, meskipun secara kualitatif tentukan susah kalau secara kuantitatif, ini kami juga ingin dijelaskan bukannya tidak terjawab dari laporan KPK kami juga tahu, misalnya

atau yang disampaikan oleh media misalnya KPK berhasil menyelamatkan sekian dari sektor sumber daya dan lain-lain sebagainya, tapi ini barang kali dalam pengajuan anggaran kedepan juga tergambarkan Pak, outputnya juga lebih agak menukik lagi walaupun disini juga sudah saya lihat output itu.

Itu saja saya kira Ibu Ketua, yang spesifik hanya soal Novel Baswedan yang selebihnya adalah untuk perbaikan-perbaikan, terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarukatuh.*

**PIMPINAN RAPAT:**

Walaikum'salam Warahmatullahi Wabarukatuh.

Terima kasih Pak Arsul, terakhir Fraksi Nasdem silahkan Pak Taufik.

**F-NASDEM (Drs. TAUFIQULHADI, M.S):**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarukatuh

Yang saya hormati Pimpinan,

Yang saya hormati semua mitra kami disini, KPK, BNN, BNPT, dan LPSK.

Secara umum kami menganggap bahwa apa yang disampaikan oleh semua mitra kami, mitra Komisi III pada kesempatan hari ini adalah sesuatu yang kami anggap sangat tepat, tidak ada hal yang harus kami kritisi secara sangat dalam, tetapi nanti setelah rapat ini kami akan melakukan Pleno kami akan memutuskan nanti setelah itu juga kami akan komunikasikan dengan Fraksi kami semuanya, tetapi kami yang hadir dalam kesempatan ini sebagai Anggota Komisi III, tidak ada hal yang perlu kami sikapi secara dalam. Misalnya permintaan tambahan KPK kami anggap wajar, ada keluhan dari KPK bahwa program untuk pemberantasan Tipikor ini turun tetapi juga barang kali kalau dalam perspektif saya barang kali ini baik juga, barang kali korupsi di negara kita sudah turun jadi tidak ada sesuatu yang tetapi tidak ada masalahnya nanti kita akan bicarakan ini dalam diskusi kontek kita nanti dalam Pleno.

Kemudian BNN juga kami menganggap bahwa permintaan tambahan 1,4 Triliun telah tepat sekali, jadi kami nanti akan menyampaikan hal ini kepada Fraksi agar ini didukung, karena kami menganggap bahwa persoalan ketika Presiden bahwa kita mengatakan bahwa kita adalah *emergency* narkoba, tetapi tindakannya tidak ada daruratnya jadi biasa-biasa saja. Jadi saya berharap dengan dukungan-dukungan anggaran begini saya berharap apa yang disebut dengan darurat itu adalah benar-benar harus tampil darurat.

Jadi secara umum saya setuju hanya ada hal misalnya ada program seperti pemberdayaan peran serta masyarakat kepada BNN sekitar 45 Miliar, kemudian ada penguatan lembaga komponen masyarakat itu apa bedanya saya ingin tanyakan. Apakah selama itu sudah dilaksanakan kenapa kami dari Komisi III itu tidak tahu, jadi coba ini kami disebutkan apa yang telah dilakukan nanti kepada BNN, tetapi secara umum kami tentu saja sepekat apa yang diusulkan oleh BNN ini.

Kemudian tentang apa yang diusulkan oleh BNPT juga ada kekurangan 137 Miliar, ini juga kami akan minta kepada Fraksi agar diberi dukungan terhadap hal ini karena kami juga merasa setelah ada Undang-undang Terorisme yang baru, jadi secara umum kita setuju terhadap apa yang diusulkan oleh BNPT apalagi kemarin itu ketika

membahas anggaran yang cukup besar dengan Polisi itu pokoknya tidak ada diskusinya langsung ketok palu saja, menurut kami itu adalah kurang bagus itu. Jadi bagaimana dengan anggaran-anggaran yang relatif kecil ini.

Masa kita kemudian harus mengkritisi habis-habisan, tetapi meskipun begitu kita harus tanyakan juga misalnya ini tidak terlalu dimasukan kehati ini ya, furniture gedung pusat pengadilan krisis ada 18 Miliar misalnya, kemudian efektivitas pelaksanaan satgas cegah itu adalah 15 Miliar, itu kenapa lebih besar furniture ini nanti dianggap oleh orang ini apakah BNPT mau duduk-duduk saja atau bagaimana, coba ini dikritisi dilihat kembali ya Pak, jadi itu harus sedikit masuk akal masyarakat karena kalau kita Komisi III ini tidak ada masalahnya.

Kalau berkaitan dengan LPSK kami sepakat seperti yang disampaikan teman kami tadi kecil sekalai memang, memang ini harus dibuat program yang lebih dilihat dan kemudian ditunjukkan bahwa LPSK itu adalah penting bagi bangsa kita sebagai sebuah lembaga baru, kalau tidak nanti ini hanya untuk sekedar hadir dan ini adalah tugas dari sebagai Pimpinan LPSK, karena itu kalau hari ini jumlah anggarannya seperti ini maka kami sepakat kita minta agar didukung ini nanti, tetapi bukan persoalan anggarannya lantas kecil kita dukung tetapi kita ingin lembaga ini hadir harus maksimal.

Begitulah kita cara melihatnya kalau tidak nanti selalu LPSK akan mengatakan kamikan anggarannya kecil sekali tidak bisa melakukan apapun, karena itu adalah ada rumah-rumah perlindungan korban, saksi korban, terpaksa kami serahkan kepada KPK nanti begitu, saya kira KPK juga ada rumah aman sendiri nanti ya. Mungkin demikian dari saya, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarukatuh.

#### **PIMPINAN RAPAT:**

*Walaikum'salam Warahmatullahi Wabarukatuh,*

Terima kasih Pak Taufiq.

Bapak-Ibu mitra kerja sekalian tadi sudah ada 5 Fraksi yang menyampaikan catatan-catatan dan beberapa klarifikasi, dari meja Pimpinan saya ingin menyampaikan 3 hal saja Bapak-Ibu sekalian. Pertama untuk Kepala BNPT terkait dengan Undang-undang Terorisme itu ada beberapa Peraturan Pemerintah yang harus segera diselesaikan bersama dengan institusi lain, jika anggarannya minta ditambah berarti siapkan juga infrastrukturnya Pak PP nya, ini mohon diselesaikan segera dengan koordinasi bersama institusi lain, karena ada mandat 4 fungsi kewenangan baru BNPT yang luar biasa lewat Undang-undang terorisme.

Selanjutnya yang kedua terkait dengan LPSK, tadi di anggaran LPSK itu ada pembayaran ganti rugi juga untuk korban terorisme, di Undang-undang itu memang diwajibkan jadi mohon ini dikoordinasikan dengan jelas keteman-teman BNPT sehingga tepat sasaran Pak, jangan sampai korban terorisme yang sebenarnya lebih membutuhkan malah tidak dapat.

Selanjutnya yang terakhir yang ketiga dari meja pimpinan, kami mohon lembaga mitra ini untuk melibatkan penuh para Anggota Komisi III dalam setiap sosialisasi yang diselenggarakan di daerahnya, kami dari meja pimpinan tidak ingin mendapatkan informasi lagi kalau misalnya contoh LPSK membuat sosialisasi dikatakanlah di Jawa Timur, tidak ada satupun Anggota Komisi III yang diundang untuk kegiatan itu, itukan agak aneh Pak karena kita ini mitra kerja dan begitu juga misalnya BNPT mau

mengadakan kegiatan untuk membangun kader-kader untuk kontra radikalisme, tentu saja kita punya 52 orang Komisi III dari berbagai Provinsi Pak ini sumber daya yang kuat kalau Bapak mau melibatkan sama-sama untuk memerangi radikalisme, dan catatan yang sama Pak Heru untuk teman-teman BNN.

Saya kira catatan dari meja pimpinan itu saja, selanjutnya kita akan mendengarkan tanggapan dari mitra, kalau tadi terakhirnya LPSK sekarang saya mulai dari kiri dahulu ya nanti terakhirnya ini bergiliran saja, silahkan Pak yang umum-umum saja tanggapannya.

#### **KETUA LPSK:**

Terima kasih Ibu Pimpinan.

Untuk LPSK sebenarnya tidak ada yang secara spesifik, tetapi kami ingin memberikan respon terima kasih tentunya dukungan yang diberikan kepada LPSK dari semua Fraksi yang tadi sudah menyampaikan, saya hanya ingin menggaris bawahi saja tadi terkait dengan keberadaan anggaran kita yang masih sangat kecil, sehingga tadi Wenny Warouw mengatakan bahwa jangankan untuk Indonesia tapi untuk Jakarta saja jangankan-anggaran tidak cukup, itu memang kami rasakan seperti itu tetapi karena Undang-undang 13 2006 dan 31 2014 inikan untuk seluruh Indonesia, sehingga walaupun ada permintaan perlindungan dari daerah lain itu mau tidak mau kami memang harus memberikan layanan dengan segala keterbatasannya.

Kemudian yang selanjutnya dari Ibu Pimpinan, kami katakan bahwa kami sudah menyiapkan karena kebetulan sudah ada putusan yang memutuskan bahwa korban terorisme itu mendapatkan kompensasi, dan itu putusan untuk kasus teroris yang terjadi di Medan yang dimana hakim sudah mengabulkan untuk memberikan kompensasi sebesar Rp 611.000.000,00 dan harus kami bayarkan ditahun ini ditahun 2018 ini, tidak menutup kemungkinan untuk peristiwa-peristiwa yang terjadi ditahun 2018 bila nanti persidangannya dilakukan tahun ini dan tahun depan, itu akan ada lagi putusan dari pengadilan yang memberikan kompensasi kepada korban dan kami tentunya akan menyiapkan anggaran tersebut.

Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas dukungannya, mudah-mudahan dengan dukungan dari Bapak dan Ibu seluruh Anggota Komisi III kiranya kita harapkan kinerja LPSK kedepan juga lebih baik, terlebih lagi tahun ini juga akan ada seleksi Pimpinan LPSK dan mudah-mudahan di 2019 nanti dengan Pimpinan yang baru juga semangatnya akan lebih baru lagi, dan kinerja LPSK akan lebih baik lagi mudah-mudahan. Untuk yang terakhir sekali dari Bapak Anwar tadi menanyakan terkait dengan anggaran LPSK di anggaran sebelumnya ditahun 2017, jadi anggaran LPSK sebesar Rp 75.900.000.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 73.252.000.000,00 sehingga dalam presentasi penyerapan 98,21%, mungkin itu saja yang saya sampaikan.

Terima kasih Pimpinan kami akhiri, *Wabillahi Taufik Wal Hidayah, Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarukatuh.*

#### **PIMPINAN RAPAT:**

*Walaikum'salam Warahmatullahi Wabarukatuh,*

Pak Suhardi silahkan Pak.

## KEPALA BNPT:

Terima kasih Pimpinan.

Kami ijin menjawab beberapa pertanyaan dari Anggota Dewan, yang pertama kaitan dari Pak Nurdin Pak, kita mempersiapkan Plan B bila dibenarkan ini sudah kami lakukan dengan contohnya kami tahun lalu menganggarkan 800 yang di acc hanya 500 Pak, jadi kami membuat target secara prioritas untuk itu. Kemudian kami juga dalam rangka menyikapi Rancangan Undang-undang yang baru atau sudah menjadi Undang-undang baru, kami sudah berkoordinasi sama Menpan untuk menambah struktur Pak, tapi penambahannya akan juga butuh waktu baik itu personil dan lain sebagainya tetapi kami utamakan kepada perangkatnya dahulu, sebagai pusat kendal krisis dimana itu menjadi alat Presiden di BNPT dan mengambil keputusan masalah terorisme.

Kemudian untuk Pak Anwar Pak, serapan kami 78,75% tahun lalu selau diatas rata-rata nasional Pak, kemudian selanjutnya untuk Pak Toha ini karena beliau bekas Wakil Bupati jadi tahu persis bagaimana kesedihan ya Pak, jadi mengajukan anggaran kemudian biasanya tidak akan penuh tapi kurang tetapi akan kami maksimalkan dengan sasaran prioritas sebagaimana Pak Nurdin sampaikan tadi.

Selanjutnya Pak Arsul juga sebenarnya dalam paparan kami ada sudah menjadi protap buat ini, aplikasi krina itu dari mulai arah kebijakan, strategi, progia, dan sebagainya, tetapi dalam paparan ini kami buat kami ambil cuplikan-cuplikan Pak tidak utuh, nanti kedepan kami akan buat lebih lengkap lagi. Kemudian untuk contoh program cegah apa cara kualitatif diberikan penjelasan dan sebagainya, nanti akan kami buat Pak contoh kami sasaran brainwashing itu adalah anak muda, anak muda itulah yang kami rekrut dari sekian banyak bloggers dan netizen yang followersnya banyak kami ambil Pak, dan itu luar biasa animonya dan kemudian kami ambil hanya 60 orang untuk setiap kota untuk menjadi duta damai kami, itu salah satu contoh yang mungkin akan kami sampaikan masalah kualitas dari pada target-target dari program pencegahan dan sebagainya.

Kemudian Pak Taufiqulhadi Pak, yang kami sampaikan masalah 18 Miliar untuk *furniture* itu adalah gedung baru, kemudian untuk yang efektivitas tadi 15 itu menambah kami sudah punya 146 Pak tapi kekurangannya itu 15 jadi memang perlu kita utamakan masalah pencegahan, apalagi dengan Undang-undang baru ini Kepolisian bisa menjangkau tahap-tahap persiapan Pak akan banyak tangkapannya, kami akan mengakses untuk program dari sisi kuotanya termasuk kontra radikalisasinya. Kemudian pertanyaan Pimpinan, kami sudah mempersiapkan mengirim surat kepada Sekneg, Kumham, dan Kemenpan, akan menjadi bagian dari Tim Penyusun Perpres dan kami sendiri sudah menyiapkan Perpres masalah kotra radikalisasi, deradikalisasi, dan kesiapan sagan nasional, ini sudah kami akomodir dalam permintaan anggaran ini untuk menyiapkan prangkat itu semuanya.

Kemudian irisan tugas kami dengan LPSK perlu kami jelaskan disini kami hanya memfasilitasi, karena dalam Undang-undang baru penentuan korban dan tidak langsung oleh penyidik, kami punya Deputi Penindakan yang punya akses kesitu, saya akan mempermudah tugas-tugas dari teman-teman LPSK Pak, contohnya korban itu mendapatkan akses pada kesehatan dan sebagainya, kami akan berkolaborasi untuk dengan Kementerian terkait untuk mengingatkan jadi tidak ada sama sekali tumpang tindih, tapi yang jelas keuangan semua berada dalam ranahnya LPSK.

Selanjutnya untuk yang terakhir kami sudah program pencegahan khususnya kami sudah melibatkan dari Komisi III seperti yang lalu kami duta damai kami libatkan Pak Ihsan Sulistio, Pak Asrul, jadi kami sudah melibatkan semua Anggota Komisi III

untuk program kami di BNPT sebagai narasumber, akan lebih bagus lagi karena Anggota Komisi III akan menyerap langsung apa yang dirasakan oleh mereka-mereka itu. Demikian Ibu Pimpinan, terima kasih.

### **PIMPINAN RAPAT:**

Terima Pak Suhardi Alius.

Ini catatan kita ini supaya kalau ada kegiatan di daerah atau di Dapil bukan ditingkat nasional, karenanya di Daerah ini tolong di maksimalkan lagi Pak ya, selanjutnya silahkan Pak Heru dari BNN.

### **KEPALA BNN:**

Terima kasih Bapak-Ibu serta Pimpinan Rapat.

Jadi untuk kegiatan ke daerah Ibu Pimpinan Rapat ada beberapa kesempatan kita juga dengan Anggota Dewan, khususnya Komisi III kita dilapangan bersama-sama. Kemudian untuk pertanyaan Pak Anwar itu kita tahun lalu kita 90,6% penyerapannya, karena sisanya itu efisiensi untuk belanja barang kita efisiensi, lalu 9% adalah efisiensi hasil lelang dan sisa kegiatan itu yang kita optimalkan. Kemudian tahun 2018 baru 25,6% karena belanja modal masih proses lelang tahap ke-2 Pak, BNN tidak usul beli kapal atau speed boat karena tidak ada tupoksinya Pak kita, kita tidak ada tupoksinya untuk menyiapkan kapal Pak, kita bisa memberdayakan serta berkoordinasi dengan bea cukai, angkatan laut, karena kita optimalkan sehingga kita bisa menggunakan bea cukai.

Ijin melaporkan Pak mungkin hanya di BNN ini kita lengkap Bapak-Ibu Anggota Dewan yang terhormat, kami disini ada juga yang dari Bea Cukai Pak Direktur kami interdiksi itu dari Bea Cukai Pak, kemudian ada juga dari Kementerian Hukum dan Ham, Kejaksaan, TNI, lalu juga Direktur kami juga ada dari Kementerian Luar Negeri Pak, jadi lengkap kami Pak. Misalkan kami butuh kapal Bea Cukai itu kita cukup Direktur interdiksi kita yang koordinasi dengan Bea Cukai bisa menggunakan kapal, kebetulan sekarang BNN kita ditunjuk sebagai Head of Seaport Interdiction Task Force di ASEAN Pak, jadi BNN yang mengkoordinir untuk seaport nya Pak, jadi kami ada penambahan anggaran pengajuan untuk penambahan interdiksi ini Pak alat-alat interdiksi untuk alat tambahan-tambahan.

Itu yang bisa kami sampaikan untuk jawaban-jawabannya, selanjutnya untuk tadi ada pencegahan pak, memang kami mungkin lebih khusus pak karena ditempat kami pencegahannya ada Deputy Pencegahan ada Deputy Pemberdayaan Masyarakat, jadi kami ada 2 Deputy untuk handle pencegahan pak. Jadi untuk Deputy Pencegahan itu membuat sistem seperti tahun ini kita membuat sistem dilapas Pak, bagaimana pencegahan dilapas bisa optimal untuk pelaksanaan pengamanan di lapas Pak, begitu juga relawan Pak dia itu pencegahan *out come* nya disana, kalau untuk pemberdayaan itu *out come* yang kita harapkan adalah anti atau ada pegiat anti narkoba itu yang pemberdayaannya. Jadi kita modelnya TOT Pak jadi kita bagaimana membangun sistem dan yang seperti program tahun ini adalah bagaimana kita ada desa bersih narkoba pak, ini program dari Pemberdayaan Masyarakat itu desa bersih narkoba kami kerja sama dengan Menteri Desa, Panglima TNI untuk Babinsa nya dan Babinsir di pesisir Pak, lalu kami kerja sama dengan Polri untuk Bhabinkamtibnas, jadi desa ini harus bersih itu targetnya.

Karena ada waktu kami dengan kesalah satu Provinsi ada Bupati membuat sayembara, untuk Kepala Desa yang desanya bersih narkoba akan mendapat motor Pak, itu desa tidak ada yang berani daftar Pak, tapi ada juga desa di Provinsi Bali yang clear bersih dari narkoba Pak ini rencana kami pada hari narkotika internasional nanti kita akan adakan di Lido kita akan undang untuk desa bersih narkoba. Begitu juga kami dengan Menteri Kesehatan Pak dengan Posyandu, bagaimana ini di Posyandu ini Ibu-Ibu selain menimbang bayi juga mendiskusikan tentang narkoba, karena narkoba ini sudah masuk kepada anak-anak ini sekarang untuk anak-anak SD, SMP, jadi yang kita masukan untuk penggiatan.

Lalu untuk Pak Asrul Sani, kita tidak dimasukan dalam program ini untuk Perundang-Undangan untuk kita masukan anggarannya, anggarannya kita masukan di halaman 4 dipoint 4 yaitu pelaksanaan pengendalian penyusunan peraturan perundangan, demikian yang bisa kami sampaikan kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.

#### **PIMPINAN RAPAT:**

Terima kasih Pak Heru, selanjutnya terakhir ke Pak Agus ya Pak silahkan.

#### **KETUA KPK:**

Terima kasih Pimpinan.

Saya akan mencoba menjawab dari depan tapi sayangnya Pak Masinton tidak ada, Pak Masinton tadi menanyakan mengenai kenapa kita selalu usulnya kecil-kecil rendah anggarannya, mungkin juga begini sebagaimana tadi kami sampaikan kalau Bapak-Ibu melihat usulan kamikan langsung dipotong begitu ya, kami mengusulkan 1,046 Triliun langsung dipotong lebih dari 20% langsung hanya dikasih pagu indikatif jadi mau mengusul banyak juga ini percuma nanti dipotong.

walaupun sebetulnya betul sekali seperti yang disampaikan oleh Pak Warouw tadi sebetulnya pembangunan back data itu penting sekali, karena kalau kita bisa menggabungkan antara data pembayaran pajak, hasil kita mengumpulkan pajak, kemudian kemungkinan-kemungkinan ini kalau diperkuat dengan penyelidikan dilapangan sebetulnya harapannya memang akan meningkatkan kasus-kasus lebih ke arah *big fish* sebetulnya, tapi kami minta komitmen saja kalau nanti kami usulkan dicoret atau tidak, jadi mungkin itu nanti yang kalau memang Bapak-Ibu akan mengharapkan ada suatu integrasi data yang sangat kuat antar sektor yang direncanakan dengan baik, itu kami akan mengusulkan.

Kemudian pak Masinton tadi juga menanyakan mengenai pembinaan jaringan, sebetulnya pembina jaringan ini ada dibuku yang sudah Bapak-Ibu pegang halaman 23, disitu ada secara detail pembina jaringan itu apa, jadi mulai dari kita melakukan koordinasi dengan teman-teman penegak hukum, 23 yang paling bawah sama 24 yang paling atas Pak, itu elektronik surat SPDP dimulainya penyidikan kemudian kita juga pembinaan jaringan yang dimaksud disini juga adalah kerja sama dengan luar negeri dengan G20, APEC, SIPEX, ADP, OCD, dan lain-lain. Kemudian disini juga kita sebetulnya membina jaringan dengan banyak komunitas, baik itu kampus Muhammadiyah dan lain-lain termasuk gereja, itu jaringan-jaringan yang coba kami bina, kemudian yang tidak kalau pentingnya ini juga dilakukan perekaman sidang di 33 Provinsi untuk sidang-sidang Tipikor.

Jadi sebenarnya banyak yang dilakukan nanti secara kualitatif kalau di jelaskan nanti silahkan, jadi kami banyak melakukan hal sebetulnya hanya mohon maaf kalau nanti Bapak-Ibu melihat tulisannya agak kebawah ini kelihatannya banyak yang pengetikannya salah mengikuti spelling yang ada di word, sidang menjadi saiding, kemudian payung hukum menjadi pay ing hukum, jadi mohon maaf ini teman-teman kelihatannya kurang jeli untuk melihat itu dan mohon maaf untuk kesalahan ketik tadi.

Berikutnya pertanyaan dari Pak Anwar, tahun lalu kami awalnya menerima 734 Miliar ditengah jalan kami mendapatkan APBNP yang jumlahnya cukup besar, karena memang penambahan pegawai itu dimulai pada waktu itu, jadi didalam APBNP itu.

#### **PIMPINAN RAPAT:**

Pak Agus sebentar tadi kita sepakat selesai pukul 13.00 WIB, ini sudah lewat 13.10 WIB kira-kira kita tambah lagi sampai pukul berapa ini,

#### **F-PPP (H.ARSUL SANI, SH.,M.Si):**

Iya 15 menit, karena begini Pak Pimpinan KPK kan ada rapat di Menkopolhukam, saya juga ditunjuk mewakili DPR, jadi kita sama-sama paling tidak harus setengah 2 harus jalan ke Menkopolhukam, terima kasih.

#### **PIMPINAN RAPAT:**

Berarti kita selesai 13.30 ya.

(Rapat Setuju)

silahkan Pak Agus diteruskan.

#### **KETUA KPK:**

Tahun lalu itu Pak Anwar, kami mendapatkan ditengah jalan mendapatkan 115 Miliar jadi totalnya dari awal 734 itu menjadi 839, kemudian terakhir penyerapan kami 93,3% itu mungkin menjadi informasi Bapak.

Kemudian berikutnya mengenai dari Asrul banyak yang ditanyakan, yang paling penting mungkin transparansi mengenai pembiayaan Saudara Novel, Saudara Novel Tahun 2017 itu menghabiskan 3,5 Miliar, itu seluruhnya dibiayai oleh dana kepresidenan, karena terus terang kami takut menggunakan dana anggarannya KPK, jangan-jangan kalau penggunaannya berbeda dari alokasi awal nanti menjadi temuannya BPK, kemudian Bapak tadi memang mengizinkan kemudian misalkan kami minta tertulis ada kami akan berani, karena ini sudah disetujui DPR kami akan bilang begitu, karena di 2018 ini masih berjalan dan 2018 itu sudah menghabiskan 389 juta sekarang ini dibiayai dari *buffer insurance* padahal *buffer insurance* 1,5 Miliar untuk seluruh karyawan KPK, jadikan tidak adil kalau hanya dipakai 1 orang.

Jadi kalau nanti apakah memang diijinkan misalkan untuk membiayai Saudara Novel dengan menggunakan dana dari KPK, Bapak menulis surat itu akan menjadikan dasar dia tidak membutuhkan dana buffer tapi dana anggarannya KPK, perlu saya gambarkan kemarin operasi itu dilakukan untuk mata kiri, mata kirinya perkembangannya sangat lambat tapi remang-remang tapi sekarang itu jarak 2 meter bisa melihat remang-remang, tapi sayangnya mata kanannya ada kemungkinan dioperasi seperti mata kiri, ini



yang mungkin kepastiannya itu memang agak lama kapan sembuhnya itu kira-kira, jadi kalau diijinkan menggunakan dana anggaran KPK akan sangat berterima kasih, karena sampai saat ini kami menghubungi istana untuk menggunakan seperti yang lalu kelihatannya jawabannya masih belum jelas.

Itu yang bisa kami sampaikan mengenai ini.

**F-NASDEM (Drs. TAUFIQULHADI, M.S):**

Ada post yang bisa digeser kira-kira.

**F-PPP (H.ARSUL SANI, SH.,M.Si):**

Tidak ada itu PA BUN dari Kementerian Keuangan.

**KETUA KPK:**

iya kalau dari KPK tidak ada 99 itu BUN, itu yang bisa kami sampaikan mengenai kalau kita menggeser karena sudah dialokasikan untuk suatu kegiatan pasti kemudian ada pengurangan untuk kegiatan itu, implikasinya pasti kinerja atau performanya pasti turun untuk yang bidang itu, alangkah sangat baik kalau seperti tahun lalu tadikan saya cerita tadi ada penambahan anggaran KPK itu sebesar 115 Miliar, kalau itu bisa diberikan penambahannya kami sangat terima kasih.

**F-NASDEM (Drs. TAUFIQULHADI, M.S):**

Ketua kalau misalnya salah satu post yang telah dimasukan tadi digeser kesana mau, bisa begitu ya.

**F-PPP (H.ARSUL SANI, SH.,M.Si):**

Nanti kita sampaikan ke Fraksi masing-masing Pak ya.

**PIMPINAN RAPAT:**

Baik Bapak-Ibu sekalian dari 6 Fraksi yang hadir sudah menyampaikan catatan-catatannya, kemudian dari teman-teman mitra juga sudah memberikan jawaban atas beberapa pertanyaan, yang terakhir tadi soal Novel Baswedan itu clear bukan dari anggarannya KPK, tahun 2017 ada 3,5 Miliar semua dari istana yang membiayai.

Fraksi Partai PDI Perjuangan tadi sudah menggunakan haknya untuk bertanya, ada 1 Fraksi yang belum menggunakan hak nya baiklah kita bersikap adil kalau ada Fraksi yang belum menggunakan haknya kita berikan kesempatan dahulu untuk Fraksi PKS untuk menggunakan haknya, setelah itu baru pendalaman karena PDIP sudah 2 orang yang menggunakan haknya, saya kira kita beri kesempatan dahulu kepada Pak Nashir Jamil dari Fraksi PKS, silahkan Pak.

**F-PKS (H. M. NASIR JAMIL, S.Ag.,M.Si):**

Terima kasih Ibu Erma.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarukatuh,*

Ibu Ketua Rapat,  
Bapak-Ibu Komisi III,  
Dan juga mitra kerja kami BNPT, BNN, KPK, dan LPSK,  
Serta hadirin yang kami hormati.

Tentu kepada BNPT paskah kita sahkan Undang-undang Terorisme itu tentu banyak perubahan, kesiap siagaan nasional, kontra radikalisme, dan radikalisasi itu menurut saya menjadi penting, dan yang kedua juga kami berharap karena BNPT juga punya kuasa serta kita di DPR juga punya kuasa, jadi mari kita mesinergikan kuasa kita sebab kalau mengedepankan kuasa kita masing-masing nanti bisa tidak sama Pak, karena itu memang dalam konteks kuasa penetapan anggaran, pengawasan, tentu kami berharap agar kedepan BNPT bisa lebih hikmah dalam menyampaikan berbagai macam pendapat di media masa, kadang-kadang bukan kita menyalahkan media tapi terkadang dilapangan dan yang dikantor itu beda persepsinya, yang dilapangan mengutip ini nanti yang dikantor dia buat lain lagi sehingga kemudian menimbulkan kegaduhan, persepsi, yang kemudian miring terhadap lembaga yang kita cintai ini, itu harapan kami.

Kemudian yang kedua kepada KPK ini ada dalam halaman 24, melaksanakan pembinaan jaringan kerja dalam rangka perekaman sidang dan supporting, pelaksanaan rekam sidang pengadilan Tipikor di lakukan di 33 Provinsi, hasil dari persidangan ini dimanfaatkan oleh berbagai pihak antara lain MA, Kejaksaan, KPK, untuk menjadi bahan evaluasi dan masukan untuk perbaikan dimasa mendatang, ini penting menurut saya ini penting sekali ini hanya bagaimana implementasinya kemudian realisasi kongkritnya, jadi apa yang diperbaiki sehingga kemudian aparatur penyelenggara tidak berani lagi atau tidak punya kesempatan, jadi walaupun dia mempunyai kemauan, keinginan, tapi dia tidak bisa karena tidak ada kesempatan. Jadi apa yang yang sudah dilakukan dari hasil point 5 ini Pak karena kita setiap hari diberitakan dengan OTT dimana, seolah-olah DPR ini sudah kasih Undang-undang ke KPK tapi kerjanya hanya OTT.

Inilah yang kita harapkan sebenarnya dari hasil perekaman sidang itu kemudian bisa kita lihat ternyata mereka sering melanggar Pasal ini, bagaimana caranya agar Pasal ini tidak dilanggar lagi kedepan, ini yang saya pikir memang harus kita seriuskan dari Komisi III ini supaya kedepan di Tahun 2019 tidak ada lagi kemudian OTT ini dan ini, jadi sebenarnya bukan kita kemudian tidak pro pemberantasan korupsi karena selama ini kalau kita bicara seperti ini lalu kita dipilah, yang bicara seperti ini berarti tidak pro pemberantasan korupsi kan kira-kira begitu, kita dihadap-hadapkan dengan persoalan seperti itu.

Karena itu Ketua Ibu Erma yang saya hormati, barang kali point 5 ini harus kita kejar jangan lagi bagaimana sebenarnya kemudian KPK berdasarkan rekaman sidang itu memetakan mana Pasal yang sering kerap dilanggar, kemudian bagaimana caranya seperti itu, kalau kemudian hanya kita tidak tahu ini apa evaluasi dan apa perbaikannya itu dimasa mendatang ini kapan, jadi ini Pimpinan KPK dengan tidak merasa bahwa saya tidak menghormati apa yang sudah dilakukan oleh KPK tapi saya pikir point 5 ini penting kami memberikan tekanan, dan kemudian KPK juga bisa memberikan kepada Komisi III yang sudah memberikan regulasi, donasi, dalam pengertian keuangan anggaran kepada KPK, untuk kemudian kepada kita dan seluruh masyarakat Indonesia bahwa berdasarkan hasil rekaman disidang pengadilan Tipikor kami menemukan begini dan kami akan memperbaikinya, sehingga kemudian yang tadi itu.

Karena begini Pak Laode, disatu sisi memang OTT itu dapat mengarapkan bisa memberikan efek jera, tidak berani lagi Bupati, Wali Kota, Kepala Daerah, dan lain

sebagainya, tetapi ternyata tidak seperti itu dan karenanya memang kita khawatir kalau ini terus dilakukan ini akan berdampak kepada menurunnya kepercayaan Pemerintah terhadap penyelenggaraan negara, kalau sudah seperti itu bagaimana kita ingin membangun rakyat supaya percaya dengan aparat penyelenggaraan negara, oleh karena itu Ketua Rapat Ibu Erma yang saya hormati inilah satu catatan dari kami yang soal anggaran-anggaran dan lain sebagainya, saya pikir kita harus memberikan atau menerima apa yang mereka sudah sampaikan ini, tinggal nanti Fraksi-Fraksi akan memberikan pendapat terkait dengan anggaran-anggaran yang sudah diajukan oleh mitra kerja.

Barang kali demikian Ibu Erma catatan kami, terkait nomor 5 ini mudah-mudahan ada kejelasan seperti apa evaluasinya dan kemudian bagaimana masukannya, dan apa konsep perbaikan dimasa datang, sehingga kemudian Pak Agus Raharjo dan Pimpinan lainnya meninggalkan sunah hasanah, meninggal suatu hal yang baik kepada Pimpinan yang akan datang sehingga Pimpinan KPK yang akan datang tidak lagi kemudian tangkap sana kemudian tangkap sini, karena kalau itu terus dikerjakan sayang KPK Pak, demikian terima kasih Ketua.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarukatu.*

#### **PIMPINAN RAPAT:**

*Walaikum'salam Warahmatullahi Wabarukatuh*

Terima kasih Pak Nashir, selanjutnya Pak Arteria.

#### **F-PDIP (ARTERIA DAHLAN, ST.,SH):**

Terima kasih Ketua.

Saya juga ingin menyatakan ini LPSK, BNPT, BNN, ini mau kita apakan, kalau model politik anggaran postur anggarannya seperti ini mending kita bubarkan saja Ketua, karena ini orang bagus-bagus semua, ini hanya kita lihat ke dunia internasional sudah ada LPSK, BNPT, BNN, tapi mereka tidak diongkosin Ketua, saya hanya kasih contoh bicara di LPSK saya tidak tahu LPSK punya prestasi atau tidak, tapi kalau postur anggarannya seperti ini bagaimana ingin hebat, 37,37% baru untuk aksi yang lainnya untuk belanja tetap ini dan kita jabarkan lagi hanya 32 Miliar setahun, yang ongkos rumah kita saja mungkin sama jadinya.

Ini yang kita katakan ini kita mau serius tidak, teman-teman LPSK juga harus begitu harus kasih lihat, LPSK itu dibutuhkan atau tidak ada koordinasi KPK dengan LPSK, KPK ongkos sendiri punya sendiri punya rumah aman safe house tidak butuh lagi yang namanya LPSK, begitu juga Polisi dan jaksa sudah tidak butuh lagi LPSK, karena LPSKnya tidak bekerja dengan bagus atau tidak bisa diandalkan, atau tidak sesuai dengan selera mitra kita juga tahu. Kita juga mohon nanti dikasih gambaran Pak, jadi apa yang namanya program kegiatan target capaian apa karena ini tidak kelihatan walaupun ini rapat pertama, saya mohon maaf dikomisi saya sebelumnya ini detail Pak memang DPR tidak boleh masuk kesatuan tiga Bapak-Ibu, tetapi Undang-undang mengatakan setelah di ketok kita berhak mendapatkan satuan tiga yang kemarin, tetapi kan ini tidak ada tiba-tiba kita gas ini setuju-setuju untuk apa seperti itu, kita tidak tahu yang dikeluarkan mereka itu apa.

Hukumnya politik anggaran punya hukum satuan tiga DPR tidak boleh masuk, nanti KPK berperasangka kita mau titip-titip program, tapi hukumnya juga bagi KPK ini saya kasih tahu begitu satu bulan anggaran, mereka itu berhak wajib menyerahkan kepada kita anggaran dipakai untuk apa saja Ketua, ini yang tidak pernah dikasih sama mitra saat datang kesini kinerjanya minta duit terus. Ini semuanya saya lakukan ini bukan hanya di Komisi III saat kemarin saya di II dan VIII saya katakan seperti itu, kalau kita ingin benar kemarin uang kamu pakai untuk apa kita cek dahulu baru keluar angka yang ini ditambah kemudian yang ini dikurang, baru kita bicara kerjaan ini efektif dan kerjaan ini tidak efektif.

Ini bagusnya peradabannya seperti itu, tapi saya KPKnya juga sama modelnya seperti ini kerjaannya minta duit yang kemarin dikerjain apa kita tidak tahu, harusnya menjadi contoh KPK akan menjadi pilot project untuk memberi contoh. Diluar KPK selalu ngomong bagus semua kasih contoh dan sekarang saya minta contoh yang kalian kerjakan apa kemarin, agar tahu semua ini apa baru terlihat ini kurang kemudian lebih, ini efektif dan ini kurang efektif. Jadi mohon kita rapatnya besok begitu Ketua, karena mungkin saya baru di Komisi III jadi saya tidak melihat perdebatan kebangsaan terkait dengan uang rakyat yang Rp 1,00 dikumpulin itu, tiba-tiba disini dibahas dengan cara yang lebih beradab, sayangnya juga saya pikir saya akan dapat kalau LPSK, BNPT, BNN, tapi ternyata KPKnya modelnya sama, datang minta uang tidak pernah ngasih tahu keluar uangnya apa.

Kemudian yang saya bicara lagi mengenai masalah di BNPT, ini orang bagus ini Ketua kita teman-teman di BNPT luar biasa semua orang-orang hebat, tapi kembali lagi postur pencegahan hanya 20% dengan potret Indonesia yang seperti ini, rakyat miskin banyak, radikalisasi, rakyat dapat terpengaruh semuanya, ISIS masih ada, 20% ini apa yang bisa mereka kerjakan. Jangan ini minta mereka menuntut menjadi tukang sapu yang baik saja tidak mungkin, masa anggaran 146 Miliar untuk pecegahan, penindakan 117, ini yang kita katakan ini kemarin kita ada rapat-rapat puluhan Triliun kita setuju ketok tapi ini kita bicaranya Miliar sedih banget ini. Makanya kita juga harus rapatnya lebih terintergrasi lagi, mereka ini kaum duafa yang butuh bantuan kita, jadi saya minta juga kepada media jangan salahkan BNPT kejadian kemarin tapi ini uangnya hanya 117 Miliar untuk ngawasin Republik Indonesia, anda ingin salahkan BNPT bagaimana.

Kemudian juga kembali lagi ada kata kekurangan pemenuhan 155 Miliar, ini kalau mau minta anggaran kita lihat ngomong dahulu maunya apa, kemudian target capaiannya apa dan mungkin tidak kita berhasil, ajak kita juga untuk sama-sama berfikir ini harus kita laksanakan, saya ingin kasih contoh tiba-tiba bicara peralatan pusat pendali krisis, kemudian balai pelatihan kerja pusat deradikalisasi, yang ingin kita katakan ada 2 hal yang kontra radikalisasinya bagaimana, selama ini sudah dilakukan kepada kampus-kampus tidak berguna kampus, kita punya titik-titik yang rawan teror mana tempat-tempat miskin yang keimanannya mudah sekali dipengaruhi, sehingga ketemu Allah itu jadi pengantin-pengantin, itukan ada petanya ngapain datang kekampus buang-buang uang.

Seperti model-model begitu kalau perlu saya juga mohon satuan tiga yang kemarin itu dikasih lihat Pak Kepala, biar kita bantu sama teman-teman yang ini kami kurangi tetapi ini kita tambahin, yang ini boleh kemudian yang ini kita kuatkan, sepakat ini semua tapi kita mohon seperti itu. Deradikalisasi juga begitu Pak bagaimana orang bisa taubat nasuha, Bapak kasih deradikalisasi 20 Miliar atau 1 Triliun sekalipun, saya kasih contoh DITI dikasih pom bensin sama Pak Harto Pak, tetapi begitu otaknya masih teroris dia balik lagi udah kaya malah menghantam kita lagi Pak, ini DITI jaman dahulu Pak, sekarang yang harusnya dilakukan adalah membuat yang itu ketitik nol lagi, ini sama seperti narkoba Pak. Kita harus cari ada tidak program yang bisa mengembalikan mereka semua ke titik nol Pak, buat apa kita kasih mereka mesin jahit dan segala macam,

itu nanti ada program Kemensos namanya rehabsos Pak, saya mantan Komisi VIII saya paham. Tugas BNPT adalah menjadikan orang itu ke titik nol orang itu tidak kepikiran lagi ingin teror, ada tidak programnya disini Pak, ini yang diperbanyak kalau Bapak mau minta banyak ratusan Miliar kita kasih lagi Pak.

Kemudian saya pindah sedikit ke BNN, Pak Heru di KPK kerjanya bagus tapi disini seperti lembu saya lihat Pak, ini ada lebih rendah 222 Miliar dikurang yang ada saja tidak cukup, Bapak datang ke Kabupaten-Kabupaten Pak target pemberantasan narkoba di BNNK hanya 1 kasus, padahal aktivitas narkoba mungkin 1 hari itu ada 10 atau ada 100 perhari, didaerah saya di Blitar Kediri sekarang itu pil koplo Pak, begitu ketangkap dia naik kelas bisa jadi pengedar kalau tidak punya duit, kalau punya uang dia bisa menjadi pemakai

#### **PIMPINAN RAPAT:**

Pak Arteria kita tadi sepakat sampai 13.30 WIB.

#### **F-PDIP (ARTERIA DAHLAN, ST.,SH):**

Iya saya kira sebentar saya hanya memberitahu itu sedikit lagi ya.

Kemudian ditempat Bapak yang punya senjata itu sedikit Pak, bahkan BNN yang punya Polisi sedikit Pak, yang memang dia Polisi yang bisa melaksanakan pemberantasan istilahnya dan ini yang diangkat dong jangan model-model desa bersih narkoba, kenapa mesti desa anti narkoba untuk lembaga kepresidenan harus bersih narkoba, DPR harus bersih narkoba, narkoba itu tidak kaya miskin tidak edukatif dan orang tidak sekolah tapi semuanya kena, ini yang kita melihat terintergrasi dong programnya Pak Heru jadi lebih jelas lagi, saya jadi pesimis ini kalau lihat penanganan di BNN ini. Ini namanya latah Pak kalau desa bersih narkoba dan sebagainya, tetapi pusat kekuasaan harus bersih narkoba, jadi tidak tidak tepat lah kalau desa bebas narkoba.

Ini untuk KPK terakhir, pertama saya ingin tanyakan ini kebetulan Dapil saya itu OTTnya kena Gubernur, Bupati, sama Wali Kota kita tidak,

#### **PIMPINAN RAPAT:**

Pak Arteria kita tambah dahulu ya 15 menit.

(Rapat Setuju)

#### **F-PDIP (ARTERIA DAHLAN, ST.,SH):**

Iya ini penting sedikit ini.

Ada OTT kemarin, saya tidak ingin ikut campur yang namanya koruptor tangkap saja kalau dia korupsi tangkap tidak ada urusan, tapi kita tidak mau ini diambingin kasih tahu dong Bupati kita kena tidak kemudian Wali Kota kita kena tidak, sampai sekarang tidak ada jawaban bagaimana apa yang mau dipertanyakan, saya butuh kepastian disini Pak kalau memang koruptor tangkap, tapi kalau tidak segera sucikan itu mereka. Untung saya bilang sama Pak Kapolres saya di backup KPK Pak, saya bisa bilang tidak usah

back up kalau model-model begini, kalau memang itu korupsi silahkan tapi kalau tidak tolong diinikan.

Selanjutnya KPK ini seharusnya senang karena KPK ini adalah beberapa lembaga yang anggarannya dinaikan disaat uang rakyat ini sedang susah, mohon nanti KPK juga sampaikan kepada publik DPR mendukung KPK dikasih uang lebih walaupun uang rakyat juga sulit, jadi jangan disampaikan DPR tidak mendukung ini, kita mendukung KPK mau minta uang berapapun kita dukung Pak, permasalahannya ini biaya pemberantasannya dikurangi itu pertanyaan saya kalau biaya pemberantasannya dikurangi oleh kita spiritnya ke pencegahan, apakah ini akan mengganggu kerja-kerja Bapak tidak, kasih tahu Pak Laode Ketua kalau mengganggu kasih tahu kita bisa tambahkan lagi tidak apa-apa.

Kemudian berikutnya adalah ada proyek prioritas nasional, ini pelatihan pengelolaan aset kepada aparat penegak hukum, output 60 orang 443 juta apa ini bentuknya seperti apa, pemanfaatan aset tipikor untuk instansi penegak hukum seperti apa gambarkan dong, siapa itu penegak hukumnya yang mana juga. Kegiatan penyelenggara humas 8 Miliar itu modelnya macam apa Pak saya ingin tahun pak, kadang-kadang humas-humas KPK ini kan saya sudah berulang kali kita harus menghormati semua lembaga Pak termasuk juga DPR, kalau Bapak jelek-jelekin DPR yang ruginya adalah rakyat karena pengawasan terhadap Pemerintah itu berkurang, jadi harus tahu hukum tata negara ini KPK, jadi kalau Bapak hantem DPR terus yang rugi itu rakyat.

Selanjutnya untuk Novel kita juga malah mohon maaf Pak, mohon maaf sampai sekarang negara belum bisa melakukan penegakan hukum yang tuntas, jadi kalau saya menjadi Novel uangnya yang mana pakai saja mau uang siapa juga, tidak boleh ada serangan terhadap aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, tetapi saya minta juga ilmunya Pak ini kalau BNN mati, BNPT mati, sama teroris itu bagaimana tanggung jawabnya atau biaya kesehatannya bisa tidak Presiden ngasih duit juga kemereka, jangan KPK sama Novel saja dikasih Pak Heru ya karena ini BNN kalau kenapa-kenapa sama pentingnya Pak, KPK sama BNPT itu sama pentingnya.

Kemudian yang kedua bagaimana kegiatan penyelidikan tindak pidana korupsi, ini target kayak penyelidikan, penyidikan, penuntutan itu 105 kasus, ini dari tahun ketahun angkanya tidak segitu Pak selama ini ongkosnya dari mana KPK Pak, berarti ada kekurangan atau kelebihan atau bagaimana itu Pak. Kemudian untuk penyelenggaraan pendidikan sosialisasi dan campaign anti korupsi.

#### **PIMPINAN RAPAT:**

Pak Arteria saya harus mengingatkan Bapak, kita selesai pukul 13.45 kemudian teman-teman mitra juga harus menjawab apa yang tadi ditanyakan.

#### **F-PDIP (ARTERIA DAHLAN, ST.,SH):**

Iya sebentar 1 menit lagi, kegiatan penyelenggaraan pendidikan sosialisasi kampanye anti korupsi ini 33 M ini outputnya juga sudah jelas saya senang ada outputnya, ini saya ingin tanyakan Pak kita ini hubungan kadang-kadang mesra, kadang-kadang anget, kadang-kadang agak sengit, kenapa yang seperti ini kenapa Bapak tidak kerja sama saja dengan kita, kita dilibatkan jadi kita juga tahu sosialisasi penyelenggara pendidikan dan gunanya juga tahu, bahwa DPR itu pro sama pemberantasan korupsi Pak, saya berkali-kali bicara dengan Pak Laode dilibatkanlah kita tapi hanya omongan tidak pernah direalisasi.

Jadi kita juga mohon ada beberapa kegiatan yang bisa kita dilibatkan sekaligus juga memberikan citra kami bahwa DPR ini juga pro sama pemberantasan tindak pidana korupsi, terima kasih.

### **PIMPINAN RAPAT:**

Terima kasih Pak Arteria panjang dan lebar, silahkan Bapak-Bapak Pimpinan mitra untuk menanggapi tadi ada dari Pak Nashir Jamil KPK khususnya apa sih hasil perekaman sidang itu Pak, ini menurut saya juga menarik tolong ditanggapi dahulu, mulai dari KPK ya nanti balik kanan saja silahkan Pak Agus.

### **KETUA KPK:**

Pak Nashir pembinaan jaringan itu arahnya memang kedua hal, jadi yang pertama untuk perbaikan dan saran terhadap penegak hukum terutama jaksa dan hakim, pada waktu mereka melakukan kritigasi, kemudian yang berikutnya adalah perbaikan sistem, jadi antara lain kita kepada Pemerintah tadi sudah disampaikan oleh Pak Rahman, kita melihat postur korupsi itu yang paling besar itu suap, kemudian nomer dua adalah pengadaan barang jasa, kita sudah menyarankan pengadaan ini selalu kolusi dari awal itu karena tidak diawasi, oleh karena itu kita menyarankan kepada Pemerintah antara lain pengawas internal itu lebih independent tidak dibawah Bupati atau dibawah Gubernur kalau di daerah, kalau di Kementerian tidak dibawah Menteri tapi langsung kepada Presiden, supaya mereka bisa melakukan cek and balances terhadap penyelenggaraan pengadaan barang jasa.

Jadi sangat dimungkinkan kedepan misalkan kalau pengawas internal itu mengawasi dengan ketat nanti ada semacam pengawasan, atau rambu ini boleh jalan dan yang ini tidak itu dari internal mereka, karena selama ini yang paling banyak kasusnya dipengadaan tadi dan disuap. Jadi itu hasil-hasil yang kemudian kita sedang dievaluasi kita kemudian ada yang disarankan kepada Pemerintah, dan pendampingan kita itu juga terkait dengan antara lain kalau suap itu Pemerintah daerah disuruh memperbaiki mengenai perbaikan ijin perijinannya, memakai E-Perijinan kemudian disana ada kejelasan mengenai waktu, berapa meja yang harus dilalui, transparansi mengenai biaya, jadi sebetulnya dari evaluasi ini hasilnya sudah cukup banyak tapi memang belum berhasil dengan baik didalam pelaksanaannya, karena seperti sarang untuk memperbaiki pengawas internal juga sampai hari ini juga belum dilakukan oleh Pemerintah.

Kemudian Pak Arteria banyak sekali kelihatannya, Pak Arteria hasil dari pekerjaan kita itu setiap tahun selalu dilaporkan wujudnya adalah laporan tahunan, laporan tahunan itu KPK mengirimkannya selalu kepada DPR, Presiden, kemudian kepada Publik, publik itu biasanya kami juga mengundang para stake holder untuk melihat itu, dan sebetulnya kalau Bapak bertanya kepada saya itu saya termasuk orang yang sebetulnya pro dengan DPR itu masuk lebih dalam, jadi bukan hanya satuan tiga Pak karena kalau satuan tiga hanya proyek, saya itu inginnya masuk lebih rincian dari satuan tiga bahkan, tapi yaitu kalau dibanyak negara boleh masuk tapi yang tahu bukan hanya DPR dan Pemerintah tetapi dipasang di website, rakyat kemudian bisa memonitor.

Jadi saya sangat setuju kalau mungkin kita juga terpikir di KPK untuk mengadu ke MK supaya keputusan DPR tidak boleh membahas satuan tiga itu kalau bisa dibatalkan, tetapi rakyat harus tahu pembicaraan Bapak pada waktu menyusun anggaran, jadi itu kalau posisi kami supaya kalau kemudian betul-betul detail sampai harga itu tahu. Kemudian yang tadi Bapak tanyakan mengenai BMN ini diberikan ke

aparatus penegak hukum apa, kami sudah memberikan banyak sebetulnya jadi ada walaupun prosedurnya melewati prosedur yang sebenarnya Pak, prosedur yang dituntut oleh peraturan perundang-undangan jadi selalu dimasukkan nanti dilaporkan Kementerian Keuangan kalau ada APA yang meminta kemudian dari situ, kemudian nanti ada penyerahan hibah dari negarabukan dari KPK kepada aparat penegak hukum tadi, jadi bareskrim kalau tidak salah sudah dapat tanah, mobil-mobil banyak dikasih diberikan kepada aparat-aparatus penegak hukum di daerah jadi ini sudah kami lakukan.

Kemudian kami tidak antipati kalau kemudian mengajak Bapak-Ibu ke daerah untuk melakukan sosialisasi untuk pencegahan, jadi rasanya memang kita harus bersama-sama menggarap ini semua, mungkin dalam kesempatan-kesempatan tertentu kita bergabung dengan Bapak untuk menjelaskan kepada masyarakat, dan terima kasih kalau tadi Bapak menyampaikan komitmen DPR untuk mendukung berapapun kebutuhan dari KPK, dan tadi seperti yang saya sampaikan sebetulnya kalau kita bisa membangun integrasi data dalam suatu big data yang kita bisa menggabungkan data mengenai sektor perpajakan kita kenapa selalu kurang, kemudian potensi tambang batu bara yang masuk ke negara juga kurang, kalau itu semua bisa digabungkan saya pikir kita bisa menangani sistem itu jauh lebih sistematis Pak, mungkin itu terima kasih.

Yang OTT ini saya sendiri masih menunggu konpres yang hari ini, jadi nanti sebelum konpres teman-teman dari lapangan datang akan eksposi didepan kami, kemudian setelah itu jadi kami setelah anak-anak melakukan itu ada waktu 1x24 jam untuk kemudian menentukan yang bersangkutan ini disalah atau tidak, kemudian yang dijadikan tersangka yang mana, hari ini waktu kami datang kesini belum mendapatkan laporan itu jadi nanti segera akan ada eksposnya di kantor KPK dan kami akan segera melakukan konferensi pers, begitu Pak prosedur kami.

#### **KPK (LAODE MUHAMMAD SYARIF):**

Saya tambahkan sedikit Pak Jamil tentang OTT-OTT, sebenarnya kalau kita lihat dari postur kasus yang sekitar seratusan kasus pertahun itu Pak, OTT itu paling banyak 10% Pak hanya karena beritanya saja gemanya itu besar tapi sebenarnya tidak banyak, jadi kalau kita misalnya sampai 100 kasus paling 10% dari itu, jadi sebenarnya tidak terlalu banyak, itu saja terima kasih.

#### **PIMPINAN RAPAT:**

Baik selanjutnya Pak Herus silahkan Pak.

#### **KEPALA BNN:**

Baik mungkin saya menjawab pertanyaan Pak Arteria ya, bahwa nilai yang anggaran sini sudah jelas Pak, semua kegiatan yang ada di BNN kita ajukan Pak dan program kita di KL-KL ini kita efektifkan Pak untuk P4GN dimasukkan dalam RABnya Pak, harapan kami nanti ada inves bisa turun pada hari HANI Internasional kita akan clear itu Pak, termasuk disemuanya Pak termasuk di DPR untuk diterapkan P4GN, jadi pengadaan untuk tes urin itu sendiri Pak supaya bisa optimal pak.

Selanjutnya kenapa desa Pak ini perlu saya sampaikan, targetnya adalah karena menjadi berkembang terus Pak, kalau kita penyalahgunaan narkoba itu ada 57% adalah coba pakai yang masih coba-coba ini kebanyakan generasi muda Pak, ini yang kebanyakan ada di desa-desa dan segala macam ini yang menjadi fokus kita Pak,



supaya bonus demografi yang kita andalkan ini bisa kita dapatkan untuk 2040 kita menjadi Indonesia Emas, dan ini tugas kita bersama pak.

Saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan, jadi masalah yang desa bebas narkoba itu kita fokus kesana Pak jadi sama-sama, terima kasih.

#### **F-PDIP (ARTERIA DAHLAN, ST.,SH):**

Kalau KPK pencegahan kita sepakat tapi kalau BNN itu kita bunuh orang, kita biarkan Bapak untuk bunuh bandar narkoba.

#### **KEPALA BNN:**

Baik Pak ini ijin melaporkan, disini dari anggaran ini dari lidik dan sidik kita cukup besar kita interdiksi kita disini kita fokuskan masuk kedalam, untuk upaya-upaya menindakan saya kira sudah sering kita lakukan dan kita optimalkan, termasuk ijin melaporkan juga disini kita juga defensif aktif Pak, kita pengembangan yang di Taiwan itu yang di Polisi Taiwan itu bisa mendapatkan perkembangan, jadi kemudian kita simultan Pak bukan hanya pemberantasan, pencegahan, dan rehabilitasi kita bersama-sama Pak, terima kasih Pak.

#### **F-PKB (DR. H.M. ANWAR RAHMAN, M.H):**

Tambahan sedikit Ketua.

Jadi saya mohon ke Pak BNN di mix untuk atas bawah Pak, jadi kita ada desa diacak kita grebek narkoba kemudian di atas, diatas DPR perlu dites narkoba semua Pak, hari ini DPR kemudian besok BNPT dites narkoba, besok lagi KPK tes narkoba, jadi kita ini sebagai Pimpinan memberikan contoh yang baik bahwa kalau kita semua ingin bersih ya atasnya harus bersih begitu, terima kasih Ketua.

#### **PIMPINAN RAPAT:**

Iya nanti kita mulai dari Komisi III sebagai mitranya kita mulai dari Komisi III, selanjutnya Kepala BNPT.

#### **KEPALA BNPT:**

Terima kasih Pimpinan.

Pertanyaan Pak Nashir Jamil akan kami sikapi Pak untuk lebih hati-hati dalam memberikan statement, karena memang seperti radikalisme dan sebagainya juga perlu masih banyak multitafsir, tapi yang dimaksud radikalisme disini adalah anti pancasila, intoreran, dan sebagainya, sehingga tidak membuat ketenangan juga tidak teruyah-uyah.

Kemudian pak Arteria Dahlan terima kasih banyak, kita ini memang postur pencegahan 20% memang diusulkan dengan kemampuan kami Pak, personil kami tidak terlalu banyak juga tetapi yang kami fokuskan untuk pencegahan kontra radikalisasi dan redikalisasi contohnya, kontra itu memang kami menjadi perhatian tempat-tempat yang Bapak sampaikan tadi itu akan menjadi perhatian kami, tetapi jika juga tidak bisa menghilangkan seperti Perguruan Tinggi dan sebagainya, ternyata kita lihat akhir-

akhir ini memang terjadi ternyata juga persebaran luar biasa, kami juga ingin menyentuh mereka supaya dapat daya tahan terhadap perkembangan dinamika yang global ini.

Satuan tiga akan kami sampaikan, ini kami sudah akan kami sampaikan. Kemudian derat kami sampaikan bahwa yang kami laksanakan deradikalisasi selama inilah orang-orang yang sudah berstatus narapidana Pak, yang berstatus tersangka saja tidak kami sentuh, kenapa karena mereka wajib dianggap tidak bersalah sampai ada putusan yang inkrah, setelah berstatus narapidana diserahkan kelapas baru kami masuk Pak, kami asesmen ditingkat mana dia dan diklaster mana dia karena nanti pembinaanya bukan hanya disitu tetapi setelah keluarpun kita tidak bisa menjadi dia sudah baik, kita melakukan kegiatan luar lapas namanya kita itu melibatkan ulama, psikotes, dan sebagainya untuk memantau terus perkembangan, termasuk akses-akses ekonomi supaya tidak terjadi kembali seperti yang Bapak Arteria sampaikan, demikian terima kasih.

**PIMPINAN RAPAT:**

Terakhir dari LPSK silahkan.

**KETUA LPSK:**

Terima kasih.

Tadi saya kira dari Pak Arteria terkait dengan kinerja, apakah kinerja LPSK itu sudah terlihat atau tidak dan itu tentunya akan mempengaruhi dukungan khususnya penganggaran untuk kegiatan-kegiatan LPSK, pada tanggal 28 Juni kami juga diundang untuk melaporkan kinerja LPSK di Komisi III, nanti pada kesempatan tersebut tentunya kami akan kemukakan secara lebih terinci berbagai aktivitas program yang kami selenggarakan, pada kesempatan ini kami hanya sekedar menunjukkan bahwa pada tahun 2017 setidaknya ada 3378 orang yang berada dibawah perlindungan LPSK, dengan jenis tindak pidana antara lain korupsi sebesar 164 orang, perdagangan orang 257 orang, kekerasan seksual 155 orang, penyiksaan 20 orang, tindak pidana umum lainnya 294 orang, tindak pidana terorisme 80 orang, dan pelanggaran HAM berat.

Jadi itu yang selama 2017, sedangkan untuk tahun yang 2018 permohonan yang masuk di LPSK sampai bulan Mei 2018 ini berkisar sekitar 700 permohonan, mungkin itu yang dapat kami sampaikan, terima kasih.

**PIMPINAN RAPAT:**

Baik terima kasih Pak.

**KETUA LPSK:**

Dari uang tadi sudah kami sampaikan bahwa uangnya masih kurang dari anggaran yang kita punya sekarang, dan saat ini kami juga mengajukan tambahan anggaran untuk anggaran 2018 maupun anggaran 2019, terima kasih.

## **PIMPINAN RAPAT:**

Terima kasih Pak Semendawai.

Bapak-Ibu sekalian dengan demikian kita sudah mendengar paparan dari 4 mitra kita, Pleno Komisi III untuk penentuan RKA RKL ini akan dilaksanakan setelah lebaran, jadi kita tidak ingin terburu-buru kita ingin melakukan pendalaman terhadap rancangan yang sudah dibuat teman-teman mitra, karena ada beberapa yang juga membutuhkan pemikiran yang mendalam, misalnya dari BNN dari anggaran 1,5 Triliun minta tambahan lagi sebesar 1,4 Triliun, kemudian dari KPK kebutuhannya sebenarnya 1 Triliun lebih tetapi yang dikasih hanya sekitar 813 Miliar ya Pak.

Bapak-Ibu sekalian, kita akan minta masukan ya terkait dengan rancangan kesimpulan sementara dalam rapat kita hari ini, point 1 saya akan bacakan satu-persatu supaya kita paham.

1. Komisi DPR RI dapat memahami penjelasan dari:
  - a. Kepala BNN atas pagu indikatif tahun 2019 yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan sebesar 1,5 Triliun dan seterusnya, beserta usulan tambahan yang diajukan 1,4 Triliun dan seterusnya, sehingga keseluruhannya menjadi anggaran BNN yang diminta oleh Kepala BNN 2,9 Triliun dan seterusnya.
  - b. Kepala BNPT atas pagu indikatif tahun 2019 yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan sebesar 699 Miliar dan seterusnya, beserta usulan tambahan yang diajukan sebesar 155,2 Miliar dan seterusnya, sehingga total menjadi 854 Miliar dan seterusnya.
  - c. Ketua KPK atas pagu indikatif tahun 2019 yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan sebesar 813 Miliar beserta usulan tambahan yang diajukan sebesar 171,845 Miliar, sehingga total menjadi 985,30 Miliar.
  - d. Ketua LPSK atas pagu indikatif tahun 2019 yang disampaikan oleh Kementerian Sekretariat Negara sebesar 71 Miliar beserta usulan tambahan yang diajukan sebesar 52,448 Miliar dan seterusnya, sehingga total usulan LPSK 123,4 Miliar dan seterusnya.

Komisi III meminta agar menyajikan rencana program kerja yang mampu menjawab persoalan-persoalan yang berkembang didalam Rapat Dengar Pendapat, mohon dicermati Bapak-Ibu sekalian apa ada keberatan dan Anggota Komisi III ini soal angka saja ini.

Bagaimana ini untuk KPK setuju ya, kemudian BNN setuju ya, kemudian BNPT dan LPSK, kalau setuju kita sepakati point pertama ya.

(Rapat Setuju)

2. Komisi III DPR RI akan mempelajari secara teliti setiap usulan tambahan dari BNN, BNPT, KPK dan LPSK, untuk diputuskan dalam Rapat Pleno Komisi III DPR RI sesuai dengan mekanisme yang ditentukan dalam Undang-undang no.17 tahun 2014 yang telah diubah menjadi Undang-undang no.2 tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD , serta peraturan tata tertib DPR.

Apa ada yang ingin ditambahkan Anggota Komisi III,

## **F-PDIP (ARTERIA DAHLAN, ST.,SH):**

Itu kewajiban kita begitu tidak perlu dikesimpulan.

**PIMPINAN RAPAT:**

Berarti usulannya dihapus Pak Arteria, baik kita setuju ya.

(Rapat Setuju)

Bapak-Ibu mitra kerja Komisi III yang saya hormati, Pak Kepala BNN, Kepala BNPT, Ketua KPK, beserta Ketua LPSK, terima kasih Pak atas paparannya dihadapan Anggota Komisi III, kami akan menyampaikan pandangan fraksi karena itu kami minta waktu untuk didalami, karena Bapak baru menyampaikan hari ini kita belum sempat mendalaminya, kita harapkan nanti ada rapat selanjutnya yang bisa akan lebih detail. Catatan dari meja pimpinan, untuk 4 lembaga ini kami minta agar segera menyerahkan satuan tiga tahun lalu itu kewajiban Undang-undang, mohon diserahkan ke Sekretariat Komisi III sesegera mungkin.

Akhirnya setelah selesai seluruh rangkaian materi kita hari ini, dengan demikian saya nyatakan bahwa rapat pada hari ini kita tutup.  
*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarukatuh.*

(Ketok Palu 3X)

**RAPAT DITUTUP PUKUL 13.55 WIB.**